



BLUE PRINT

PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan salah satu dari 21 program utama Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik. Program ini juga merupakan peluang untuk dijadikan pendorong dalam mengembalikan Indonesia sebagai eksportir sapi seperti pada masa lalu. Tantangan ini tidak mudah, karena saat ini impor daging dan sapi bakalan sangat besar, sekitar 30 persen dari kebutuhan daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat yang secara otomatis akan menguras devisa negara sangat besar. Bila kondisi ini tidak diwaspadai, hal ini dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani khususnya daging sapi semakin jauh dari harapan, yang pada gilirannya berpotensi masuk dalam *food trap* negara eksportir.

Impor daging dan sapi bakalan semula dimaksudkan hanya untuk mendukung dan menyambung kebutuhan daging sapi yang terus meningkat. Di beberapa daerah ternyata daging dan sapi bakalan impor justru berpotensi mengganggu usaha agribisnis sapi potong lokal. Harga daging, jeroan dan sapi bakalan impor relatif sangat murah, karena sebagian besar merupakan produk atau barang yang kurang berkualitas. Kegiatan agroindustri sapi potong skala besar semakin menjurus pada kegiatan hilir saja yaitu impor dan perdagangan, dengan perputaran modal yang sangat cepat dan resiko yang lebih kecil. Aktivitas agroindustri sapi potong saat ini belum terintegrasi dan bersinergi dengan kegiatan di sektor hulu. Sementara itu kegiatan di hulu yang merupakan usaha pembibitan dan budidaya sapi, sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala terbatas dan dengan margin yang kecil. Mereka harus menghadapi persaingan yang

kurang seimbang, termasuk serbuan daging murah yang sebagian tidak berkualitas atau tidak terjamin ASUH.

Presiden pernah mencanangkan program swasembada daging sapi 2010 melalui upaya revitalisasi pertanian sebagai dasar untuk mengembangkan agribisnis sapi potong yang berdaya saing dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun program tersebut belum memperoleh dukungan dana yang memadai. Program tersebut justru menghadapi tantangan dan berbagai permasalahan baik dari aspek teknis, ekonomi, sosial maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya. Koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar pengemban kepentingan juga masih sangat lemah, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk masa yang akan datang.

Berpijak dari pentingnya penyediaan protein hewani, pengalaman pelaksanaan program sebelumnya, dan dukungan presiden dalam swasembada daging sapi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan menyusun “*Blue Print* Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) Tahun 2014”. Secara umum *Blue Print* PSDS 2014 mencakup: (i) Tinjauan Agribisnis Sapi Potong di Indonesia Saat Ini; (ii) Kerangka Pikir; (iii) Road Map Skenario PSDS 2014; (iv) Kegiatan Prioritas PSDS 2014; (v) Rencana Aksi (vi) Organisasi Pelaksana.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen *Blue Print* PSDS Tahun 2014 yang tersusun ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasional yang dikoordinasi oleh Kementerian Pertanian dan melibatkan beberapa kementerian lainnya serta seluruh pengemban kepentingan, termasuk para peternak, pelaku usaha, lembaga keuangan, asosiasi dan organisasi profesi bidang peternakan dan veteriner.

Penyusunan dokumen *Blue Print* PSDS 2014 ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan operasional yang lebih terfokus dan terpadu lintas sektoral, dari hulu sampai ke hilir.
2. Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan.
3. Memberikan acuan penyediaan input yang diperlukan dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian swasembada daging sapi Tahun 2014 secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program untuk mewujudkan PSDS 2014 mencakup 4 aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, kelembagaan, dan kebijakan, yang dirinci sebagai berikut:

1. Filosofis

Salah satu tujuan penting PSDS 2014 adalah perkembangan populasi dan perbaikan produktivitas sapi potong, serta peningkatan produksi daging sapi yang terjamin ASUH secara berkesinambungan. Tujuan ini harus seirama dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak, kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan daya saing, serta adanya kesinambungan atau keberlanjutan usaha peternakan. Dengan demikian pembangunan peternakan akan terkait dengan banyak aspek dan melibatkan seluruh pengemban kepentingan, baik para pelaku usaha, akademisi atau ilmuwan, serta pengambil kebijakan. Dari semuanya itu kesejahteraan peternak, daya saing dan kemandirian, serta kesinambungan usaha agribisnis sapi potong di dalam negeri merupakan tolok ukur terpenting dalam mewujudkan keberhasilan swasembada daging sapi.

Orientasi swasembada daging sapi tidak semata-mata diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan pengendalian impor (sapi dan daging) tetapi lebih diarahkan dalam konteks peningkatan produksi,

kesejahteraan peternak, dan kesinambungan usaha peternak sapi serta meningkatkan daya saing produksi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dampaknya akan mengurangi ketergantungan dari impor daging dan sapi bakalan. Di dalam menyusun berbagai program prioritas dan kegiatan operasional yang mengikutinya, semua asumsi dan tolok ukur yang digunakan didasarkan pada data statistik yang masih harus diperbaiki agar lebih akurat.

Dokumen Blue Print ini harus dapat digunakan untuk: (a) Mengarahkan kegiatan operasional yang lebih terfokus dan terpadu lintas sektoral; (b) Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan; dan (c) Memberikan acuan penyediaan input yang diperlukan dan pemanfaatan sumberdaya, terutama penyediaan dana yang bersifat *multiyears*. Dukungan politik dari lembaga legislatif, landasan kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, serta partisipasi pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat di pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan PSDS 2014.

2. Teknis

Ruang lingkup Program dari aspek teknis mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Menekan kematian pedet dari 20-40% menjadi 5 – 10%, dan kematian induk dari 10-20% menjadi 2 – 5%, khususnya di beberapa wilayah sumber bibit sebagai akibat kekurangan pakan dan air pada saat musim kering.
- b. Mencegah pematangan sapi betina produktif yang secara nasional masih sangat besar, yang diperkirakan mencapai sekitar 150-200 ribu ekor/tahun terutama di NTT, NTB, Bali, dan Jawa.
- c. Melakukan tunda potong sapi lokal atau sapi hasil IB sehingga mencapai bobot potong maksimal sesuai potensi genetik dan potensi ekonominya, yang diperkirakan dapat meningkatkan produksi daging sekitar 20-30%.

- d. Meningkatkan produktivitas sapi lokal dan sapi hasil IB sehingga meningkatkan jumlah sapi betina produktif, menekan nilai atau angka *service per conception* (S/C), memperpendek *calving interval*, mempercepat umur beranak pertama, dan memperpanjang masa produktif (*longivity*), yang secara keseluruhan dapat meningkatkan *calf crop* sekitar 30-40%.
- e. Meningkatkan mutu genetik sehingga *Average Daily Gain* (ADG) menjadi lebih besar, mempercepat waktu penggemukan, memperbaiki efisiensi penggunaan pakan, serta meningkatkan persentase karkas dan kualitas daging.

3. Ekonomis

Swasembada daging secara langsung akan menghemat devisa, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya akan memberi dampak peningkatan kesejahteraan peternak dan merangsang kegiatan ekonomi di pedesaan.

- a. Kegiatan di hulu, pembibitan sapi untuk menghasilkan induk maupun pejantan unggul untuk IB atau INKA. Kegiatan yang akan didukung Pemerintah ini akan dilakukan oleh pusat-pusat pembibitan milik pemerintah, swasta atau masyarakat dalam suatu *village breeding center* (VBC).
- b. Kegiatan perkembangbiakan atau *cow calf operation* (CCO) untuk menghasilkan sapi bakalan (*feeder cattle*) harus dilakukan secara ekstensif (*grazing*) atau secara intensif terintegrasi dengan agribisnis lainnya (*crop livestock system*, CLS). Kegiatan ini harus menerapkan prinsip *low external input sustainable agriculture* (LEISA) seperti yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian, atau dengan pendekatan *zero waste* dan bila memungkinkan mendekati *zero cost*, sehingga menghasilkan produk 4-F (*food, feed, fertilizer & fuel*).

- c. Kegiatan penggemukan dilakukan dengan prinsip-prinsip agribisnis, efisiensi, dengan *high or medium external input*, serta berbasis pakan lokal dengan imbang serat, energi dan protein yang ideal. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan bobot potong sesuai potensi genetiknya.
- d. Tataniaga ternak hidup dan daging harus terkait erat dengan kegiatan budidaya (*on farm*), sehingga nilai tambah untuk peternak kecil yang mengusahakan perkembangbiakkan, pengusaha penggemukan serta pedagang, jagal dan pengecer daging relatif lebih adil, seimbang atau proporsional.

4. Kelembagaan

Kegiatan untuk mewujudkan swasembada daging sapi 2014 harus didukung dengan kelembagaan yang tepat, yang terdiri dari: (i) ilmuwan, pakar dan penyuluh, (ii) pelaku usaha, baik yang berskala menengah dan kecil maupun skala besar, serta (iii) pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang bertindak sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamikator. Keberadaan kelompok peternak atau koperasi menjadi suatu keharusan, dan kerjasama kemitraan antara pihak-pihak terkait perlu diperluas.

Keberhasilan beberapa kelompok peternak atau koperasi di beberapa daerah membuktikan bahwa program yang sederhana dan mudah dipahami pengemban kepentingan atau pelaku usaha menjadi syarat mutlak. Program yang sederhana tersebut harus disosialisasikan dengan sungguh-sungguh, diimplementasikan secara konsekuen, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: transparan, jujur, adil, dan konsisten, serta dengan menegakkan *law enforcement*, dan *reward & punishment*.

Hasil kajian tim peneliti dari Universitas Brawijaya dan IPB yang disampaikan dalam Rakorteknas di Bandung pada tanggal 8-10 Desember 2009, yang dihadiri oleh Dinas Peternakan se-Indonesia, menunjukkan

bahwa kegiatan yang bersifat bantuan sosial ternyata kurang berkontribusi pada pencapaian swasembada daging sapi. Sebaliknya, beberapa kajian atau pengalaman empiris menunjukkan bahwa kegiatan akan berhasil apabila peternak diarahkan untuk melakukan usaha agribisnis berbasis sumberdaya lokal, kemitraan atau kerjasama yang berkeadilan. Penyuluhan, pendampingan dan dukungan teknologi inovatif, serta ketersediaan modal berjangka panjang dengan bunga rendah, kemudahan atau jaminan memperoleh input, dan pemasaran hasil yang memadai akan menjamin keberlanjutan dan kelancaran usaha.

5. Kebijakan

Sektor pertanian, termasuk di dalamnya usaha agribisnis peternakan, hanya akan berkembang dan maju bila didukung dengan kebijakan yang kondusif. Pada kegiatan hulu harus dapat menjamin ketersediaan input produksi secara mudah, murah dan berkelanjutan. Dukungan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) harus benar-benar dioptimalkan dan terus dikembangkan. Kredit murah untuk kegiatan penggemukan juga sangat diperlukan agar tunda potong dapat diwujudkan dengan baik. Ekspor bahan pakan, seperti bungkil inti sawit (BIS), tetes, wafer (pucuk tebu), onggok/gaplek, dlsb., harus dibatasi atau bahkan dilarang bila keperluan di dalam negeri belum tercukupi. Kebijakan dalam hal budidaya (*on farm*) harus dapat memberi kepastian usaha, terkait dengan tata ruang, pola integrasi tanaman-ternak, dlsb.

Kebijakan dalam hal harga dan perdagangan harus dapat memberi kepastian kepada pelaku usaha agar harga daging tetap atraktif namun masih terjangkau. Praktek monopoli atau kartel, impor produk tidak berkualitas dengan cara *dumping*, memasukkan daging illegal, dsb., harus benar-benar dapat dicegah. Perlindungan bagi peternak kecil dan pelaku

usaha pada umumnya dalam konteks perdagangan internasional dapat memanfaatkan instrumen *non-tariff* seperti ASUH, dan SPS.

D. Pengertian dan Istilah

1. Swasembada artinya kemampuan penyediaan daging sapi dalam negeri sebesar 90 – 95% dari total kebutuhan daging nasional.
2. Berkelanjutan artinya, swasembada daging yang ingin dicapai adalah swasembada yang berkelanjutan tidak hanya pada tahun 2014, sehingga perhitungan yang diperoleh tetap mempertahankan tingkat swasembada yang telah dicapai. Perhitungan tersebut telah mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan perkapita, elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging sapi dan parameter teknis ternak, sehingga tidak mengganggu populasi ternak.
3. Saling terkait, artinya terdapat sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan PSDS, sehingga swasembada daging menjadi efektif dan efisien.
4. Pemberdayaan peternakan, merupakan swasembada yang sepenuhnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Dalam hal ini upaya pemberdayaan lebih diarahkan kepada kegiatan untuk meningkatkan daya saing dan partisipasi masyarakat.
5. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha (perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak/kelompok peternak) pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.
6. ASUH atau Aman, Sehat, Utuh, dan Halal adalah ketentuan untuk daging sapi yang akan dipasarkan, didistribusikan dan dikonsimsi yang memperhatikan syarat-syarat kesehatan, secara etika dapat diterima masyarakat, dan memenuhi syarat-syarat ke-halal-an.

7. VBC (*Village Breeding Center*) adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang terganbung dalam kelompok peternak pembibit
8. IB (inseminasi buatan) adalah cara perkawinan pada sapi dengan teknik tertentu yang bertujuan untuk memasukkan semen beku atau semen cair ke dalam saluran reproduksi sapi betina birahi oleh inseminator. INKA (intensifikasi kawin alam) adalah sistem perkawinan dengan mencampur sapi jantan unggul dan sapi betina dengan perbandingan ideal, misalnya 1 : 20.

BAB II

TINJAUAN AGRIBISNIS SAPI POTONG DI INDONESIA SAAT INI

A. Pembangunan Peternakan Dalam Sektor Pertanian

1. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis

a. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan pada tingkat nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Sementara itu ketahanan pangan secara mikro dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Dalam konteks tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah, hingga rumah tangga (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Aspek keberlanjutan ketahanan pangan yang identik dengan kebijakan dan strategi peningkatan kemandirian pangan nasional merupakan hal yang harus diperhatikan.

Untuk mengukur ketahanan pangan dari sisi kemandirian dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan dalam negeri. Dalam operasionalnya, konsep mandiri diskenariokan sebagai kondisi dimana kebutuhan pangan nasional minimal 90 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri (Suryana, 2004). Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, kemandirian itu menjadi lebih penting lagi. Menurut Yusdja dan Ilham (2006), industri peternakan yang ketergantungannya tinggi dengan bahan baku dan teknologi impor memiliki risiko tinggi. Ini dibuktikan dengan terguncangnya industri ayam

ras dan sapi potong domestik akibat krisis moneter tahun 1997/1998, karena ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan dan bibit impor. Demikian juga, jika terjadi ketidakstabilan politik dapat merambat ke bidang ekonomi dan perdagangan. Jika hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.

Ketergantungan pada daging dan sapi bakalan impor untuk memenuhi konsumsi domestik dapat melemahkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam negeri. Jika karena sesuatu hal terjadi hambatan impor maka untuk memenuhi konsumsi terpaksa memotong sapi domestik yang terlanjur lambat berkembang. Akibatnya akan menguras populasi ternak yang dapat mengarah pada kepunahan. Oleh karena itu, ketahanan pangan hewani khususnya daging sapi tidak akan dapat terwujud tanpa: (i) penguatan sistem pembibitan yang benar, efektif dan efisien; serta (ii) pengembangan usaha perkembangbiakan sapi (*cow calf operation*) yang handal, berbasis pakan lokal yang didukung oleh teknologi inovatif, SDM yang lebih dinamis, dan kebijakan yang mampu menciptakan suasana kondusif.

b. Pengembangan Agribisnis

Tulang punggung penyediaan daging sapi di Indonesia adalah peternak berskala kecil, karena hanya sedikit peternak yang berskala menengah atau besar. Peternakan rakyat berskala kecil biasanya merupakan usaha sampingan atau cabang usaha, dan ternak tersebar secara luas mengikuti persebaran penduduk. Peternak hanya bertindak sebagai *keeper* atau *user*, hampir tidak ada yang berperan sebagai *producer*. Selain investasi pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana agribisnis sapi potong, hampir tidak ada investasi swasta (pengusaha swasta) dalam agribisnis sapi potong, kecuali kegiatan *fattening*. Hal ini sangat terkait kurangnya insentif ekonomi dalam usaha

ternak sapi potong, khususnya kegiatan pembibitan dan atau *cow calf operation*.

Berdasarkan data yang ada, dalam periode tahun 2003-2007 pangsa daging sapi asal impor mengalami peningkatan dari 10.671,4 ton (2003) meningkat menjadi 39.400 ton (2007) atau meningkat rata-rata 53,8 persen pertahun. Pangsa daging sapi asal impor tersebut saat ini sudah mencapai lebih dari 30 persen dibandingkan dengan produksi daging domestik. Relatif cepatnya pertumbuhan impor daging dan sapi bakalan menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi daging sapi domestik seolah tidak mampu mengikuti pertumbuhan konsumsi daging sapi nasional. Impor daging atau sapi bakalan saat ini justru dapat mengganggu perkembangan agribisnis sapi potong lokal yang saat ini dikembangkan masyarakat.

2. Produksi Dan Produktivitas Ternak Penghasil Daging

Pada tahun 2009 total produksi daging diperkirakan sebanyak 2,5 juta ton yang terdiri dari daging sapi dan kerbau 0,5 juta ton, kambing dan domba 0,1 juta ton, babi 0,2 juta ton, ayam buras 0,3 juta ton, ayam ras pedaging 1,0 juta ton dan ternak lainnya 0,1 juta ton. Dengan demikian produksi daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging 46,6%, sapi dan kerbau 20,4%, ayam buras 13,0%, dan babi 10,1%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2008) produksi daging mengalami peningkatan yaitu 8% persen dan peningkatan terbesar berasal dari ternak domba 15,3%, diikuti ternak kuda 5,6%, kerbau 5,4%, babi 4,9%, kambing 4,2%, ayam buras 3,4%, ayam ras petelur 3,1%, sapi 3,1% dan itik 2,9%.

Kendala utama yang dihadapi petani dalam meningkatkan produktivitas sapi adalah tidak tersedianya pakan secara memadai terutama pada musim kemarau di wilayah yang padat ternak. Untuk itu peternak di beberapa lokasi di Indonesia telah mengembangkan sistem integrasi tanaman ternak (*Crops*

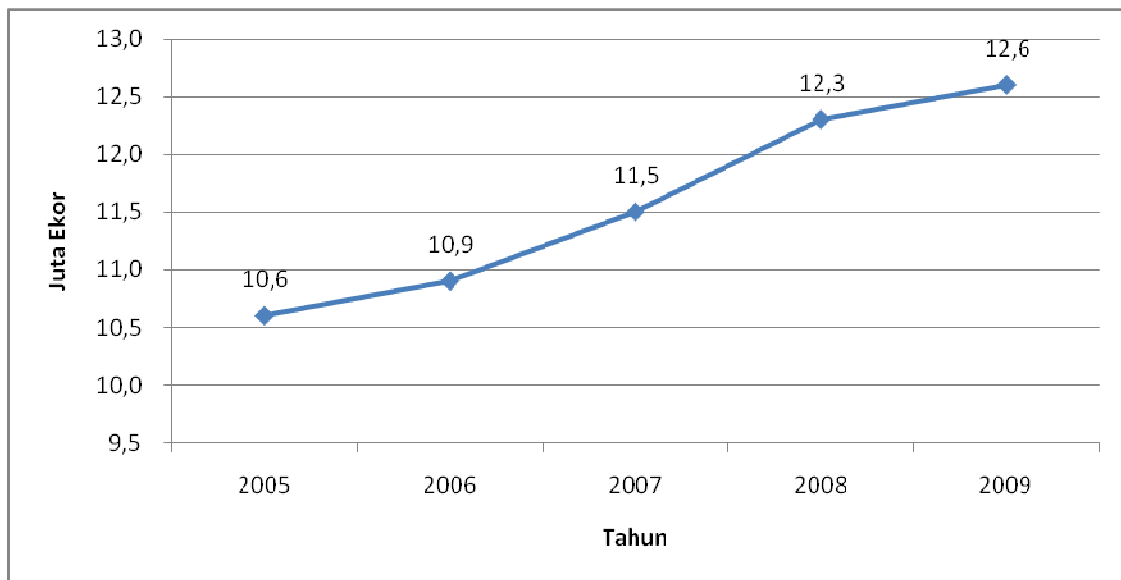
Livestock System, CLS). Pada saat ini telah dikembangkan berbagai model integrasi antara lain Ternak – Padi, Ternak – Hortikultura dan Ternak – Sawit.

B. Populasi Sapi, Produksi Dan Konsumsi Daging Sapi Nasional

1. Dinamika Populasi Berbagai Bangsa Sapi Potong

Populasi ternak sapi selama kurun waktu 2005 hingga 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 populasi sapi sebesar 10,6 juta ekor dan pada tahun 2006 menjadi 10,9 juta ekor atau meningkat 2,8%. Kenaikan populasi sapi meningkat tajam pada tahun 2007 dan 2008 yakni masing-masing 5,5% dan 6,9%. Kenaikan populasi sapi ini kemudian melambat 2,4% pada tahun 2009. Secara diagramatik, kenaikan populasi ternak sapi disajikan pada Gambar 1.

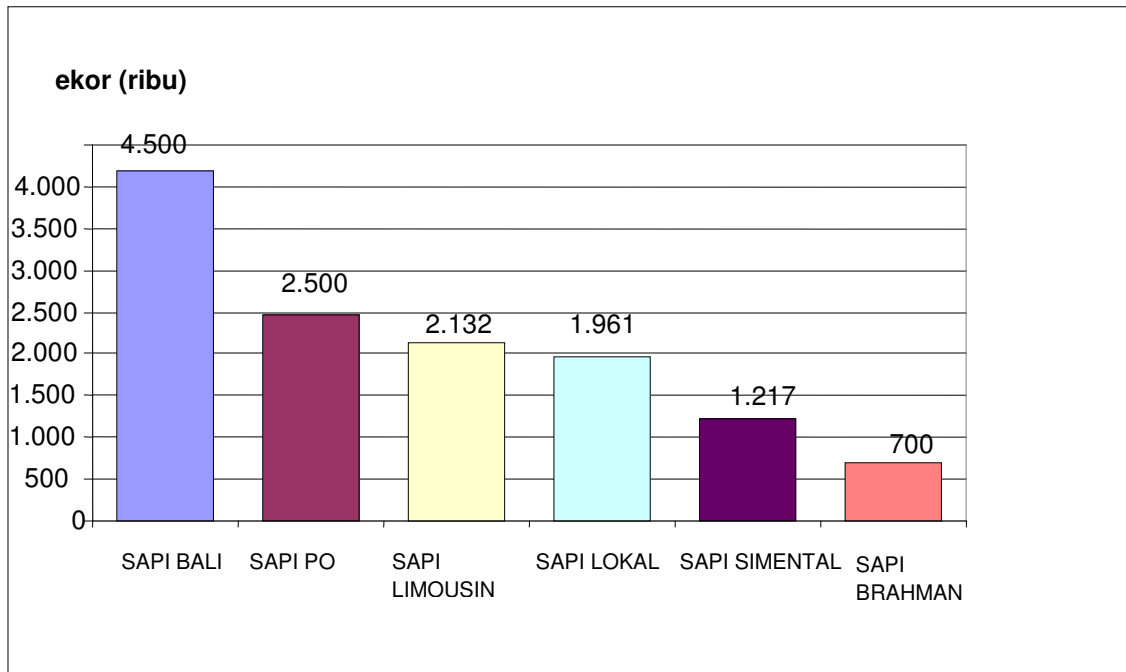
Gambar 1. Populasi Sapi Potong Tahun 2005-2009



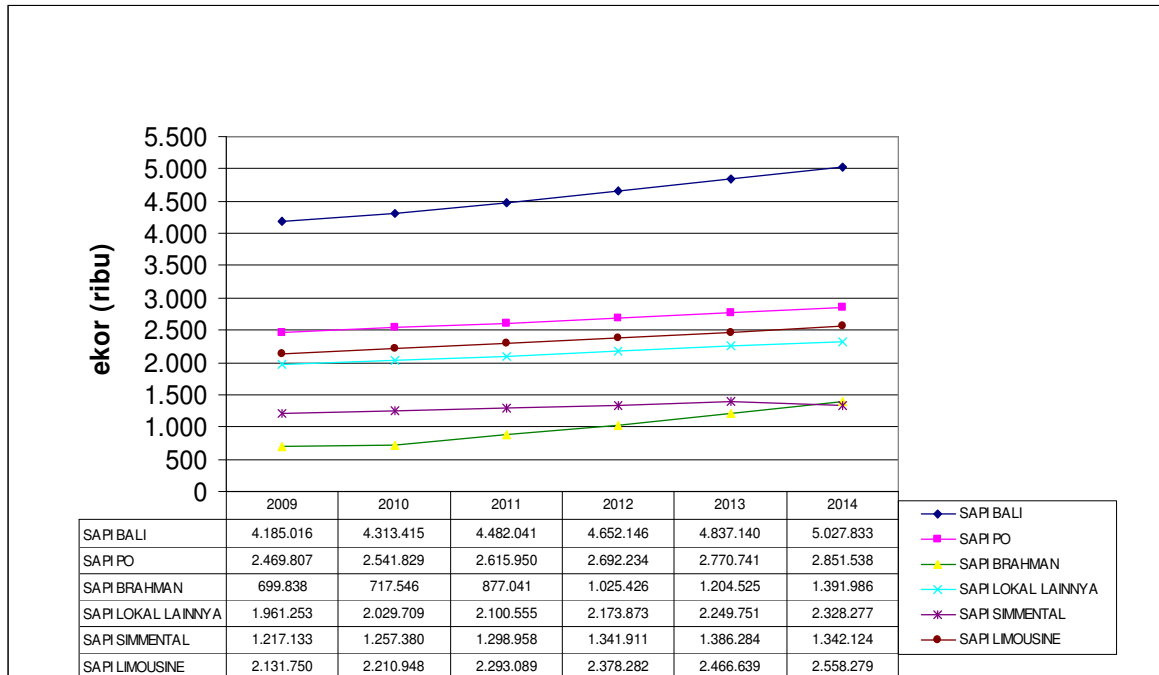
Populasi sapi potong per bangsa tahun 2009 disajikan pada Gambar 2. Dari gambar tersebut, komposisi sapi potong tiga terbesar adalah sapi Bali, sapi PO (Peranakan Ongole), dan sapi persilangan hasil IB dengan sapi Limousin, atau sering disebut sapi Liomusin. Sapi lokal lainnya terdiri atas sapi Aceh, sapi Madura, dan sapi SO (Sumba Ongole).

Proyeksi perkembangan populasi sapi potong per bangsa s.d. tahun 2014 disajikan pada Gambar 3. Analisa potensi sapi potong per bangsa dihitung dengan metode dinamika populasi berdasarkan parameter teknis masing-masing bangsa dengan memperhatikan program ke depan.

Gambar 2. Populasi Sapi Potong per Bangsa Tahun 2009



Gambar 3. Proyeksi Perkembangan Sapi Potong per Bangsa



2. Sistem produksi dan usaha perbibitan/perkembangbiakan

Usaha sapi potong dapat dikelompokkan dalam beberapa aktivitas yang saling terkait, yaitu: (i) pelestarian atau konservasi, (ii) pembibitan atau peningkatan mutu genetik, (iii) perkembangbiakan atau *cow-calf operation* (CCO), serta (iv) pembesaran dan penggemukan. Kegiatan pelestarian biasanya dilakukan untuk kerabat liarnya di kawasan konservasi, sedangkan pelestarian untuk utilisasi ternak dilakukan oleh masyarakat dalam suatu sistem yang disebut *genetic conservation by community*. Pembibitan dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul melalui permurnian/persilangan untuk membentuk rumpun/bangsa baru. Sedangkan usaha CCO biasanya ditujukan untuk menghasilkan sapi bakalan atau sekedar untuk menambah populasi. Biasanya pengertian pelestarian, pembibitan dan perkembangbiakan dicampur-adukkan, sehingga sering terjadi kesalah pahaman. Saat ini yang menjadi masalah besar di Indonesia adalah kegiatan CCO untuk menghasilkan sapi bakalan, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan sapi bakalan atau *feeder cattle*. Kondisi ini oleh

pelaku usaha dimanfaatkan dengan melakukan impor *feeder cattle* yang merupakan *commercial stock* dari Australia sejak tahun 1980-an.

Sapi lokal yang sudah berkembang di Indonesia mempunyai banyak keistimewaan antara lain adalah: (i) reproduktivitas tinggi karena mampu menghasilkan anak setiap tahun dalam kondisi pakan terbatas, (ii) masa produktif yang panjang karena dapat beranak lebih dari sepuluh kali sepanjang hidupnya bila dipelihara dengan baik, (iii) kualitas karkas dan daging sangat bagus, sehingga harganya lebih mahal dari ex-import setiap kilogram bobot hidup, serta (iv) dapat dipelihara secara intensif maupun ekstensif. Namun sapi Bali dan sapi lokal murni lainnya mempunyai beberapa kekurangan yaitu kurang responsif bila memperoleh pakan prima, dan bobot potongnya relatif kecil dibanding sapi tipe besar dari jenis *Bos Taurus* atau sapi silangan hasil IB. Keistimewaan dan kekurangan tersebut ternyata merupakan kekuatan atau potensi tersendiri bila usaha CCO sapi lokal diusahakan melalui pola CLS dengan memanfaatkan limbah pertanian atau perkebunan.

Hasil kajian Badan Litbang Pertanian di Bengkulu pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sapi Bali yang diusahakan secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit ternyata mampu berkembangbiak dengan baik. Bahkan sistem integrasi yang disebut SSKA (sistem integrasi sapi di kebun sawit *Agricinal*) ini mampu memberikan keuntungan ekonomi untuk pengusaha kebun (inti), pekebun yang memanen tandan buah segar (TBS), serta ramah lingkungan (Diwyanto dkk., 2004). Keistimewaan sapi Bali dalam SSKA ini adalah: (i) ukuran tubuh kecil sehingga mudah dikendalikan pekebun untuk mengangkut TBS, (ii) cukup produktif walau dimanfaatkan sebagai tenaga kerja ternak, karena tetap mampu berkembangbiak, (iii) mampu memanfaatkan biomasa yang berserakan di kebun sebagai sumber pakan utama, dan (iv) harganya sangat murah dibanding sapi tipe besar, sehingga modal yang diperlukan relatif sangat kecil.

Di Jawa, Madura, dan Bali, sapi lokal biasanya dikembangbiakkan secara terintegrasi dengan tanaman padi. CLS seperti ini biasa disebut dengan sistem

integrasi padi-ternak (SIPT), dimana sumber pakan utama untuk kebutuhan pokok berasal dari jerami dan dedak kasar. Ternak yang digunakan dalam sistem ini biasanya sapi PO, karena daya reproduksinya sangat bagus. Sapi PO yang dipelihara dengan mengandalkan jerami dan dedak kasar mampu berkembangbiak dengan tingkat mortalitas rendah. Akan tetapi sebagai akibat program IB yang sangat masif, saat ini populasi sapi PO sudah semakin menurun di beberapa kawasan di Jawa, dan diperkirakan tinggal 30 persen saja. Oleh karena itu diperlukan pengaturan distribusi semen beku. Ciri utama integrasi ternak-tanaman adalah adanya sinergisme atau keterkaitan yang saling menguntungkan antara ternak dan tanaman. Petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk tanamannya, kemudian limbah pertanian sebagai pakan ternak.

Integrasi Ternak-Padi. Usaha tani padi yang pengelolaannya dipadukan dengan ternak atau dengan menggunakan pupuk kandang mampu berproduksi sekitar 6,9 - 8,8% lebih tinggi dibanding usaha tani padi yang dikelola secara parsial tanpa menggunakan pupuk kandang. Dari sisi biaya, usaha tani yang dikelola secara terintegrasi membutuhkan biaya pupuk anorganik lebih rendah dibandingkan dengan usaha tani yang dikelola secara parsial. Dari aspek permintaan, tren pasar menunjukkan bahwa konsumen lebih suka memilih produk-produk pertanian organik. Sedangkan dari penghematan devisa, sistem integrasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya subsidi pupuk yang diberikan kepada petani sejak tahun 2003.

Integrasi Ternak – Kelapa Sawit. Pengembangan program integrasi kelapa sawit-sapi mempunyai peluang yang sangat prospektif. Di dalam pola integrasi ini, tanaman kelapa sawit sebagai komponen utama sedangkan ternak sebagai komponen pelengkap. Limbah kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sebagai pakan adalah pelepah sawit, lumpur sawit, dan bungkil inti sawit. Disamping memanfaatkan limbah hasil kelapa sawit, sapi yang diintegrasikan dengan kelapa sawit juga bisa memakan gulma yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Untuk menunjang keberhasilan sistem integrasi ternak

dengan perkebunan kelapa sawit, dibutuhkan dukungan teknologi tepat guna. Disamping itu ternak sapi yang diintegrasikan dengan kelapa sawit juga bisa dimanfaatkan sebagai penarik gerobak maupun pengangkut hasil panen tandan buah sawit. Kotoran sapi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, yang mana pada akhirnya bisa menghemat biaya produksi

Sementara itu dari beberapa laporan menunjukkan bahwa sapi Brahman Cross (BX) yang diimpor dari Australia yang diusahakan dengan pola integrasi ternyata tidak mampu bereproduksi sebaik sapi lokal. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sapi BX memerlukan pakan yang lebih banyak dan berkualitas. Hal ini berimplikasi pada biaya pemeliharaan yang sangat besar dan diperkirakan sekitar Rp. 10.000/ekor/hari. Selain itu terindikasi bahwa sapi BX juga sering mengalami birahi tenang atau *silent heat*, atau birahi sangat panjang. Setelah melahirkan, sapi BX sering dijumpai sulit kawin atau mengalami masa kosong (*days open*) yang panjang. Biasanya jarak beranak sapi BX cukup panjang yang diperkirakan mencapai 500 hari.

Apabila program KUPS difokuskan untuk program aksi pembibitan sapi lokal sekaligus untuk menyelamatkan SBP dari pisau jagal, dapat diperkirakan akan terselamatkan 150-200 ribu ekor induk/tahun. Jumlah ini akan memberi garansi peningkatan populasi secara alami sekitar 5-7%/tahun. Seandainya anggaran KUPS melebihi jumlah sapi betina produktif yang harus diselamatkan, maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk usaha CCO sapi BX. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan sapi BX dalam usaha CCO harus memperhatikan harga yang harus lebih kompetitif dibanding harga sapi lokal.

Sapi BX yang masuk ke Indonesia adalah *feeder cattle* atau *commercial stock* yang semestinya digemukkan untuk dipotong. Namun sebagian dari sapi-sapi tersebut (10-15%) adalah sapi betina muda yang dapat dikembangbiakkan. Harga sapi BX betina biasanya lebih murah dibanding harga sapi jantan. Sementara itu sapi jantan BX dijual kepada jagal dengan harga yang lebih murah dibanding harga sapi lokal pada ukuran yang sama. Oleh karena itu sangat ideal bila harga

jual sapi BX betina bunting yang akan diusahakan dalam CCO harus sama atau lebih murah dibanding sapi jantan BX.

3. Jaminan pelayanan kesehatan hewan

Status Kesehatan hewan yang optimal merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pencapaian swasembada daging sapi. Status kesehatan hewan terkait dengan penyakit hewan menular (PHM), penyakit hewan non infeksi yang berdampak ekonomi tinggi, dan gangguan reproduksi yang berdampak pada rendahnya *service per conception* (S/C), panjangnya *calving interval* (CI), rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya kemajiran.

Untuk menjamin tercapainya status kesehatan hewan tersebut maka dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang modern, maju, efektif dan efisien. Salah satu capaian yang signifikan dalam mendukung PSDS adalah pembebasan beberapa daerah dari penyakit *brucellosis*. Sampai saat ini dari 21 provinsi target penanggulangan gangguan reproduksi, sebanyak 7 provinsi telah bebas *brucellosis* berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, sedangkan selebihnya 11 provinsi memiliki prevalensi *brucellosis* pada sapi potong sangat rendah (0-2%) yaitu provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Barat, serta 4 provinsi yang masih dicatat memiliki kasus tinggi pada sapi potong yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur (P. Timor yaitu TTU dan Belu), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Status penyakit *infectious bovine rhinotracheitis* (IBR) dan upaya pengendalian dan pemberantasannya merupakan tantangan dalam pelayanan kesehatan hewan ke depan terutama dalam kaitannya dengan importasi sapi dari luar negeri dan pada sentra-sentra perbibitan. Sapi-sapi yang akan diimpor untuk keperluan bibit harus dijamin bebas dari penyakit IBR dan penyakit hewan menular lainnya sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.

Jaminan kesehatan hewan terhadap penyakit non infeksius salah satunya adalah pengendalian parasit internal (cacingan). Berdasarkan beberapa laporan

yang sudah dipublikasikan (Abidin, 2002), kasus cacingan pada sapi di peternakan rakyat mencapai 90%. Kerugian ekonomis akibat adanya parasit tersebut antara lain terhambatnya pertumbuhan berat badan rata-rata mencapai 0,1 Kg perhari, penurunan status reproduksi (*calving interval* tinggi) (Suhardono, 2005), yang kemungkinan berperan pada kematian pedet.

Terapi terhadap parasit internal melalui pemberian obat-obatan anthelmentika akan menyumbangkan peningkatan bobot sapi minimal sebesar 0,1 Kg perhari dan secara umum akan memperbaiki status reproduksi serta status kesehatan sapi.

Penjaminan terhadap kesehatan reproduksi (medik reproduksi) dilakukan melalui penanganan gangguan reproduksi berupa pemeriksaan status reproduksi, pengobatan, dan terapi hormonal serta pelayanan kebidanan seperti distokia, retensi plasenta dan prolapsus uteri. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim FKH IPB, 13 % dari betina produktif mengalami gangguan reproduksi yang terdiri dari *corpus luteum persisten* (CLP), *sista ovari*, *endometritis*, *hypofungsi ovari*, kawin berulang, dan abortus.

Melalui penjaminan kesehatan reproduksi yang optimal, 51% betina produktif yang mengalami gangguan reproduksi dapat diselamatkan dan siap untuk dilakukan IB atau InKA. Disamping itu, sinkronisasi estrus terhadap akseptor perlu diterapkan untuk meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran pedet.

Keberhasilan penjaminan pelayanan kesehatan hewan memerlukan dukungan prasarana antara lain penambahan dan pemutakhiran Pusat Kesehatan Hewan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan di lapangan dan sarana antara lain berupa pemutakhiran peralatan, mobilitas, obat-obatan, dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

Secara nasional jumlah puskesmas saat ini sebanyak 779 unit, sedangkan khusus di daerah prioritas PSDS telah tersedia sebanyak 671 unit Puskesmas dengan jumlah medik 434 dan paramedik 1.070. Ke depan, sejalan dengan PSDS, perlu penambahan jumlah puskesmas berdasarkan kebutuhan yang

mengacu pada populasi ternak yakni 1 (satu) puskesmas menangani 2.000 satuan ternak (*animal unit*). Demikian pula perlu dilakukan *up-grading* terhadap tenaga Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di lapangan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

4. Tren Permintaan dan Konsumsi

Produksi daging sapi lokal selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 masih berfluktuasi. Dari tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan sebesar 19,2 %, lalu terjadi penurunan pada tahun 2007 sebesar 18,8 % dan selanjutnya mengalami peningkatan lagi sampai dengan tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,1 %. Impor daging, baik yang berasal dari sapi bakalan dan daging, selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan rata-rata 10,6 % dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 5 % dibanding tahun 2008.

Konsumsi hasil ternak berupa daging pada tahun 2008 adalah 7,8 kg/kapita/tahun atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2007) yang sebesar 8,4 kg/kapita/tahun. Konsumsi kalori dan protein per kapita per hari dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran sebulan untuk per kapita pada tahun 2008 rata-rata sebanyak Rp. 386 ribu dan untuk kelompok barang makanan sebesar Rp. 193 ribu/kapita/bulan. Sedangkan pengeluaran untuk daging Rp. 7,1 ribu/kapita/bulan (1,8%) atau di bawah untuk padi-padian Rp. 36,9 ribu/kapita/bulan (10,2%).

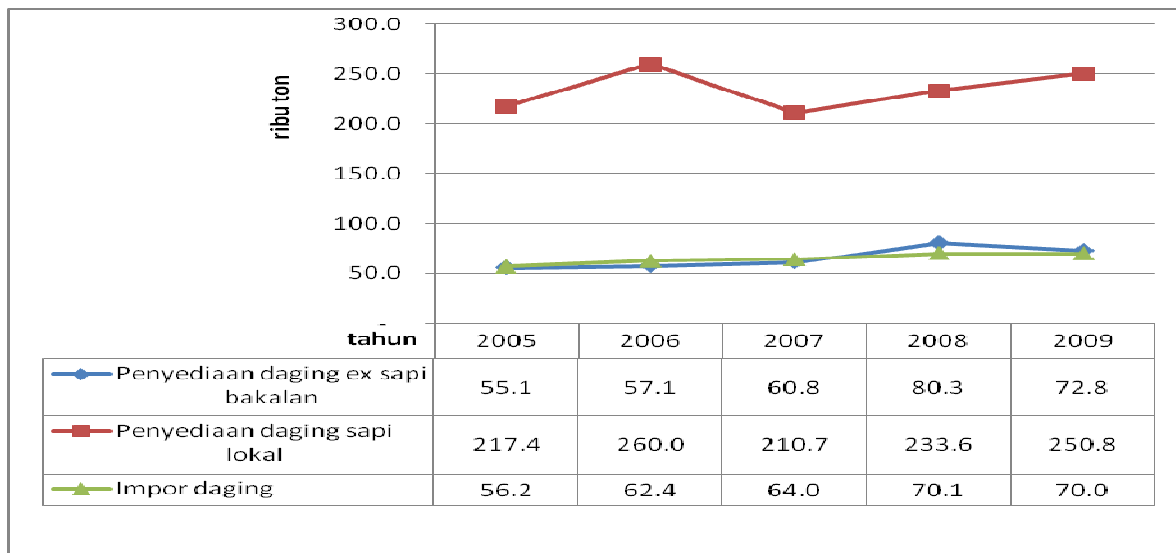
Pada periode tiga tahun terakhir, sejak 2007 sampai dengan 2009, laju pertumbuhan penyediaan daging dari produksi lokal lebih rendah dibandingkan konsumsi. Importasi ternak sapi dan daging yang semakin besar dan melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri akan meningkatkan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain dan dapat mengancam kedaulatan pangan sumber protein hewani sebagai komponen pencerdas bangsa. Penyediaan dan konsumsi daging dapat dilihat pada Tabel 1 dan grafik penyediaan Daging Sapi Lokal, Ex-Bakalan dan Impor Tahun 2005-2009, dapat dilihat ada Gambar 4.

Tabel 1. Penyediaan dan Konsumsi Daging Sapi Tahun 2005-2009

No.	Uraian	Tahun (000 ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Produksi lokal	217,4	259,5	210,8	233,6	250,8
2	Impor	111,3	119,2	124,8	150,4	142,8
	- Bakalan	55,1	57,1	60,8	80,4	72,8
	- Daging	56,2	62,0	64,0	70,0	70,0
Total Prod lokal & Impor		328,6	378,7	335,6	384,1	393,6
Konsumsi Daging Sapi				314,0	313,3	325,9
Selisih (prod. Lokal & konsumsi)				(103,3)	(79,7)	(75,0)
Selisih (impor dg kekurangan prod. lokal)				21,5	70,8	67,8

Berdasarkan tren penyediaan daging seperti pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2007 – 2009 terjadi kelebihan impor (bakalan dan daging), sehingga diperlukan kebijakan untuk pengaturan volume impor.

Gambar 4. Penyediaan Daging Sapi Lokal, Ex-Bakalan dan Impor Tahun 2005-2009



5. Proyeksi Produksi, Konsumsi dan *Balance of Trade*

Berdasarkan data statistik yang tersedia dan beberapa asumsi, penyediaan daging sapi dalam negeri dari produksi lokal pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 420,2 ribu ton. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan

penduduk rata-rata sebesar 1,2% per tahun dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging sapi yang masih baik (>1). Dengan demikian total permintaan daging sapi untuk konsumsi dan industri pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 467,0 ribu ton.

Dari simulasi dan perhitungan yang didasarkan pada data statistik yang tersedia, kebutuhan konsumsi daging mulai tahun 2013 telah dapat dipenuhi dari produksi lokal (Tabel 2), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan daging diperkirakan masih diperlukan impor. Namun perhitungan ini akan dikoreksi apabila tersedia data yang lebih akurat yang akan segera dilakukan pada awal kegiatan PSDS 2014.

Tabel 2. Proyeksi Penyediaan dan Permintaan Daging Sapi tahun 2010-2014

No	Uraian	Sasaran 5 Tahun					r (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Lokal (ribu ton)	283,0	316,1	349,7	384,2	420,4	
	<i>Pertumbuhan (%)</i>		11,7	10,6	9,9	9,4	10,4
	Penyediaan produk lokal terhadap total penyediaan (%)	70,2	75,5	80,5	85,3	90,0	82,8
2	Total Impor (ribu ton)	120,1	102,4	84,7	66,3	46,7	
a	Pemasukan ex bakalan setara daging (ribu ton)	46,4	35,2	26,8	20,3	15,4	
	Pemasukan ex bakalan (ribu ekor)	260,1	196,9	149,0	112,8	85,4	
	<i>Pertumbuhan (%)</i>		(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
b	Impor daging sapi (ribu ton)	73,8	67,2	57,9	46,0	31,2	
	<i>Pertumbuhan (%)</i>		(8,9)	(13,8)	(20,7)	(32,1)	(18,9)
3	Total penyediaan daging (ribu ton)	403,1	418,6	434,4	450,5	467,0	
	<i>Pertumbuhan (%)</i>		3,8	3,8	3,7	3,7	3,8
4	Konsumsi (ribu ton)	338,7	351,9	365,4	379,2	398,3	
5	Selisih/prod lokal & konsumsi (ribu ton)	(55,7)	(35,8)	(15,7)	5,1	22,1	
6	Selisih/impor dg kekurangan prod, lokal (ribu ton)	64,4	66,7	69,0	71,4	68,8	

C. Rantai Pasok Daging Sapi Internasional Dalam Konteks Industri Sapi Potong Nasional

1. Status penyakit hewan menular negara produsen dan pengeksport

Dalam mekanisme perdagangan bebas, sistem perdagangan yang diterapkan tidak diperbolehkan menggunakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan

yang diperkenankan adalah penerapan hambatan teknis (*Technical Barrier to Trade/TBT*). Dengan demikian suatu negara yang secara konsekuen mengikuti kesepakatan WTO, dalam memfasilitasi perdagangan ternak dan produk ternak menerapkan persyaratan *sanitary and phytosanitary* (SPS).

Penerapan SPS pada intinya adalah menerapkan persyaratan teknis untuk melindungi sumber daya dan kesehatan manusia termasuk lingkungan. Dengan demikian dalam perdagangan atau pemasukan ternak (sapi) dan produk sapi perlu diterapkan persyaratan teknis dan penerapan analisa resiko yang akan sangat bergantung pada situasi dan status penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) dan Zoonosis di suatu negara.

Perkembangan situasi dan status PHMU di suatu negara secara regular dilaporkan dan terdokumentasikan pada organisasi kesehatan hewan dunia (*Office des Internationale Epizootic/OIE*). Indonesia sebagai salah satu negara anggota OIE telah mempunyai acuan dalam pemasukan ternak dan produk ternak yaitu dengan berdasarkan kepada UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada dasarnya pemasukan sapi hidup ke Indonesia harus berasal dari negara yang bebas dari PHMU dan Zoonotic berbahaya. Khusus untuk pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 20 tahun 2009. Hal ini memberikan peluang terhadap negara manapun untuk dapat menjadi negara pengekspor ke Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Adapun jenis penyakit eksotik yang dipersyaratkan antara lain Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease/FMD*), *Rinderpest*, *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuro-pneumonia* (CPBP) dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) dengan status negligible BSE risk.

Salah satu aturan global yang penting dalam perdagangan antar negara dalam melindungi negara terhadap ancaman hama dan penyakit baik yang mengancam hewan, tumbuhan dan manusia adalah *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* yang merupakan satu-satunya hambatan *non tariff*. Aturan

ini menjadi faktor penting dalam mendukung PSDS sebagai pendorong Indonesia untuk mempertahankan status bebas beberapa penyakit yang tidak ada di Indonesia (eksotik) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) dan penyakit eksotik penting lainnya seperti NIPAH, Hendra dan Rinderpest.

Berdasarkan *World Animal Health Information Database* (WAHID) yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) maka saat ini terdapat beberapa negara yang bebas PMK dan BSE, yaitu antara lain Australia dan New Zealand, sehingga kedua negara tersebut dapat dijadikan sebagai negara pemasok daging sapi maupun ternak sapi hidup. Namun demikian, prinsip kehati-hatian terhadap adanya penyakit hewan menular lainnya di negara tersebut juga perlu dicermati.

Pada saat ini Australia masih belum bebas dari penyakit *Infectious Bovine Rhinotracheitis* (IBR), *Bovine Viral Diarrhea* (BVD), *Johne's Disease/Paratuberculosis*, *Enzootic Bovine Leucosis* (EBL), *Anthraks*, *Bluetongue*, *Q Fever*, Tetanus, *Malignant Oedema*, *Blackleg*, *Pulpy Kidney*, *Black Disease*, *Botulism*, *Actinomycosis*, *Salmonellosis*, *Leptospirosis* dan Penyakit Parasiter seperti *Cysticercosis* dan penyakit cacing lainnya, sehingga diperlukan persyaratan tertentu agar ternak sapi yang diperoleh merupakan ternak yang sehat. Selain itu, sebagai upaya pencegahan terinfeksi ternak sapi terhadap penyakit hewan yang ada di Indonesia namun tidak ada di Australia, maka ternak tersebut harus divaksinasi sebelum dikirim ke Indonesia, yaitu vaksinasi untuk mencegah penyakit anaplasmosis dan babesiosis. Adapun status penyakit hewan menular di New Zealand kurang lebih sama seperti di Australia, namun importasi ternak sapi dari Australia sangat jarang dilakukan.

Disamping itu terdapat negara yang menerapkan zona bebas PMK di negaranya seperti Brazil. Upaya-upaya untuk mempertahankan Indonesia dari penyakit eksotik terutama dalam kaitannya dengan importasi sapi dan produknya perlu dilakukan kajian analisa resiko berdasarkan informasi yang

lengkap tentang status penyakit hewan menular di negara tersebut, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan termasuk kelembagaannya dan penyiapan penguatan kapasitas laboratorium diagnostik. Disamping itu diperlukan sistem karantina hewan yang kuat yang dilengkapi dengan Instalasi Karantina Hewan permanen di setiap pintu masuk untuk menggantikan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) secara bertahap.

2. Peran negara pengekspor daging sapi dan sapi hidup dalam memenuhi permintaan dalam negeri

Pada saat ini status Indonesia masih sebagai negara pengimpor sapi hidup (sapi bibit dan sapi bakalan atau sapi potong) dan produk daging (termasuk jerohan) yang sangat besar. Dalam lima tahun terakhir ini ketergantungan terhadap daging dan sapi bakalan impor masih tinggi, rata-rata sekitar 30-40% dari total konsumsi daging sapi nasional.

Negara-negara pemasok sapi dan daging utama di dunia yang telah memenuhi persyaratan teknis menyangkut status PHMU dan zoonotic serta mempunyai letak geografis yang menguntungkan bagi Indonesia masih terbatas jumlahnya. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara produsen sapi dan daging mempunyai posisi tawar yang sangat kuat. Untuk menyeimbangkan posisi tawar tersebut Indonesia perlu menempuh berbagai langkah antara lain dengan membuka peluang dan opsi yang tidak saja bergantung pada negara tertentu saja akan tetapi juga terhadap negara-negara lainnya. Meskipun demikian tetap harus mengedepankan aspek keamanan dari kemungkinan masuknya penyakit *exotic* dan jaminan produk daging yang memenuhi persyaratan ASUH.

Untuk itu secara aktif dan terus menerus harus dilakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan status PHM di negara-negara yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan pangan asal hewan serta kehalalan. Dalam tahun 2004, impor masih didominasi produk dari 2 (dua) negara yakni Australia dan New Zealand. Namun sejak tahun 2007 sesuai

dengan perkembangan situasi dan status PHMU serta zoonosis berbahaya, telah dibuka secara berturut-turut produk dari USA (2007), Kanada (2008), Brasil (2009) dan Irlandia (2009), setelah memenuhi hasil analisa risiko dan diaudit dari aspek keamanan dan jaminan kehalalan. Dengan demikian, Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih baik, walaupun hal ini bukan berarti Indonesia akan meningkatkan impor daging atau sapi bakalan.

Khusus impor sapi hidup untuk pembibitan, Indonesia masih tergantung dari 2 (dua) negara, Australia dan New Zealand. Sedangkan untuk kebutuhan sapi bakalan, impor hanya berasal dari Australia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mencari negara atau sumber lain, dengan tetap memperhatikan *precautionary principle* atau memenuhi persyaratan teknis terkait dengan risiko PHMU dan zoonosis berbahaya, serta secara teknis maupun ekonomis lebih kompetitif.

3. Jenis dan volume produk daging sapi impor

Berdasarkan realisasi impor daging sapi dan jeroan 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan untuk impor daging tetapi terjadi penurunan untuk impor jeroan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Impor Daging Sapi Tahun 2004 s.d. 2009 (000 ton)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Daging Sapi	11.8	21.5	25.9	50.2	57.2	64,1
Jeroan (Offal)	36.5	34.7	36.5	13.8	12.9	10,6
Jumlah	48.3	56.2	62	64	70.1	74,7
Kenaikan (%)		16.36	11.03	2.56	9.53	6,56
Jeroan : Daging (%)	75.3	61.7	58.5	21.5	18.4	14.19

Adapun jenis daging sapi yang diimpor meliputi: (i) *Prime Cut (Bone Less dan Bone Inn)*; (ii) *Secondary Cut (Bone Less dan Bone Inn)*; (iii) *Variation Meat*; serta (iv) Offal yang terdiri dari 2 (jenis) yakni jantung dan hati. Ke depan, proporsi masing-masing jenis daging yang diimpor harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran, dalam jumlah yang

proporsional, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan ASUH maupun kepatutan.

4. Tren permintaan terhadap berbagai jenis daging sapi impor

Permintaan dalam negeri terhadap berbagai jenis daging sapi ex-impor antara lain untuk menunjang perkembangan pariwisata yang memerlukan pasokan daging berkualitas atau *prime cut* untuk hotel dan restoran. Selain itu dengan semakin baiknya kondisi perekonomian dan tingkat pendidikan serta kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi daging maka telah tumbuh restoran dan cafe lokal yang menghadirkan menu dengan kelas dan jenis potongan daging tertentu.

Dalam kurun waktu tahun 2004 s/d 2006 proporsi jumlah impor jeroan terhadap daging cukup tinggi berkisar antara 58,5% - 75,3%, sehingga pemerintah sejak tahun 2007 mengeluarkan kebijakan mengurangi jumlah jenis jeroan dari 8 jenis (jantung, hati, babat, usus, limpa, paru, ginjal dan testes) menjadi 2 jenis yaitu hanya menyisakan jantung dan hati sapi. Terlihat pada tabel 3 di atas, bahwa proporsi jumlah jeroan terhadap daging yang diimpor pada tahun 2007 adalah 21.5% pada tahun 2008 menurun menjadi 18.4% dan tahun 2009 menjadi 14,19%. Diharapkan ke depan, impor jeroan dapat dikurangi atau diminimalkan, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilarang sama sekali karena pertimbangan ASUH dan kepatutan.

Dalam tiga tahun tersebut proporsi SC selalu lebih tinggi bila dibandingkan jenis lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 Proporsi Jenis Daging dan Jeroan Sapi Impor sebagai berikut :

Tabel 4. Proporsi jenis daging dan jeroan sapi impor (tahun 2007-2009)

Tahun	%	PM	SC	VM	Offal	Total
2007		11.100.770	33.580.730	5.574.194	13.759.923	64.015.617
	%	17,34	52,46	8,71	21,49	100
2008		9.555.156	39.630.002	7.991.713	12.862.619	70.039.490
	%	13,64	56,58	11,41	18,36	100
2009		15.113.689	41.549.160	7.468.334	10.608.496	74.739.679
	%	20,22	55,56	9,99	14,19	100

Keterangan jenis daging sapi yang diimpor meliputi:

1. PM : *Prime Cut Meat (Bone Less, Bone In)*
2. SC : *Secondary Cut Meat (Bone Less, Bone In)*
3. VM : *Variation Meat*
4. Offal hanya terdiri dari 2 (jenis) yakni jantung dan hati

5. Strategi penguatan produksi daging sapi dalam negeri

Dalam rangka mengantisipasi permintaan daging sapi yang terus meningkat diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat produksi daging sapi dalam negeri sehingga dapat menjamin ketersediaan daging sapi secara berkelanjutan, melalui strategi yang sistematis :

a. Peningkatan atau penambahan populasi sapi betina produktif

Dalam rangka meningkatkan populasi sapi dalam negeri pada prinsipnya dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Mengoptimalkan potensi sapi betina lokal yang ada melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Upaya ini dilaksanakan dengan penerapan *Good Farming Practices (GFP)* dan optimalisasi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan. Strategi ini diarahkan untuk memperpendek *calving interval* dari > 18 bulan menjadi 13-15 bulan. Dengan optimalisasi IB maupun InKA diharapkan dapat meningkatkan angka kelahiran dari 55% – 57% menjadi 75 – 80% dari populasi sapi betina dewasa produktif.
- 2) Mengaplikasikan teknologi inovatif bidang pakan dan reproduksi agar diperoleh peningkatan jumlah anak betina terlahir dengan proporsi lebih dari 50%.

3) Menambah populasi sapi bibit betina melalui pemanfaatan sapi ex-impor, atau melalui importasi khusus sapi bibit yang berasal dari negara yang situasi dan statusnya bebas dari PHMU. Upaya penambahan populasi sapi bibit betina produktif melalui importasi dilaksanakan dengan memanfaatkan dana pemerintah maupun swasta.

b. Penyelamatan populasi sapi betina produktif

Sejalan dengan peningkatan populasi sapi dalam negeri maka penyelamatan populasi sapi betina produktif perlu ditempuh melalui upaya :

- 1) Optimalisasi pencegahan pemotongan betina produktif di RPH.
- 2) Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis (Brucellosis dan IBR).
- 3) Optimalisasi penanganan gangguan reproduksi agar tidak di *culling*.

Gangguan reproduksi pada kelompok ternak harus ditangani secara reguler oleh karena menghambat tingkat kelahiran sehingga *service per conception* menjadi tinggi dan *calving interval* menjadi panjang.

Penyakit hewan menular yang terkait langsung dan sangat menentukan status reproduksi adalah Brucellosis dan Infectious bovine rhinotracheitis (IBR). Penyakit ini akan menular terutama bila kawin alam yang menggunakan pejantan terinfeksi penyakit ataupun tersebar melalui kegiatan IB yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

c. Menekan angka kematian (pedet dan sapi muda)

Salah satu faktor penghambat peningkatan populasi sapi adalah masih tingginya kematian pedet dan sapi muda yang merupakan periode rawan kematian. Untuk menekan angka kematian diperlukan peningkatan pelayanan teknis secara optimal dan penerapan *Good Farming Practicess* (GFP), serta penyediaan pakan dan air minum secara memadai, sehingga

dapat menekan angka kematian pedet dan sapi muda menjadi 3% - 5%, dan akan dapat meningkatkan populasi 10% - 15%.

d. Peningkatan berat hidup sapi siap potong

Strategi peningkatan berat hidup sapi siap potong ditempuh melalui :

- 1) Peningkatan performans/potensi genetik dan pencegahan *in-breeding*.
- 2) Optimalisasi penerapan *Good Farming Practicess* (GFP) melalui optimalisasi potensi pakan yang berkualitas dan penerapan manajemen kesehatan hewan yang baik sehingga diperoleh peningkatan berat hidup per hari (ADG) secara optimal.
- 3) Optimalisasi dan fasilitasi usaha penggemukan/fattening, termasuk pola tunda potong sehingga berat hidup sapi siap potong menjadi maksimal. Tunda potong diharapkan dapat meningkatkan bobot potong atau produksi daging sekitar 20-40%.

e. Peningkatan kualitas pelayanan RPH

Dalam rangka penguatan produksi daging dalam negeri ditempuh strategi peningkatan kualitas pelayanan RPH yang dapat menghasilkan daging berkualitas setara dengan daging eks impor. Dengan demikian produk daging yang dihasilkan di dalam negeri dapat bersaing dengan daging eks impor, bahkan bisa ekspor ke beberapa negara Timur Tengah dan Asia karena: (i) Indonesia bebas PMK, (ii) jaminan kehalalan, dan (iii) jaminan keamanan pangan yang berbasis hygiene sanitasi dengan ditandai telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan penerapan sistem jaminan keamanan pangan *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Pada tahun 2009 Indonesia telah merintis untuk mengekspor daging dengan mengirim dalam bentuk sampel. Implementasi strategi ini secara bertahap dilaksanakan melalui fasilitasi RPH untuk pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan, proses pelayuan (aging), *cutting system* dan rantai dingin (*cold chain*).

Dengan skenario dan strategi tersebut akan menurunkan proporsi daging dan jeroan impor terhadap total permintaan daging sapi nasional dari 17,7% (tahun 2008) menjadi 5% - 7% pada tahun 2014.

D. Peran Sektor Perdagangan Dalam Tata Niaga Daging Sapi Dan Sapi Hidup

Perubahan dan tantangan strategis yang sedang terjadi adalah berlangsungnya perdagangan bebas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi dan telekomunikasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas.

Hal tersebut telah mengantarkan terjadinya perubahan pola perdagangan dan persaingan perdagangan dunia sehingga pada tahun 1988 dicetuskan kesepakatan dunia, yang dikenal sebagai *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Kesepakatan tersebut selanjutnya diwadahi dalam organisasi yang dikenal sebagai *World Trade Organization (WTO)*. Kesepakatan GATT, antara lain memuat *Agreement on Agriculture*, termasuk di dalamnya memuat perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barrier to Trade (TBT)*. Indonesia mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No.7 tahun 1994. Akan tetapi saat ini justru negara-negara maju sangat protektif terhadap perdagangan komoditas pertanian (termasuk peternakan), sehingga mereka masih menerapkan tarif yang sangat tinggi. Selain itu mereka juga sangat cerdas dalam menerapkan *non-tariff barrier*, semata-mata untuk melindungi petani/peternak yang telah memperoleh subsidi sangat besar.

Pada prinsipnya, dalam perjanjian SPS dan TBT telah disepakati tentang perlakuan non-diskriminatif, bukti ilmiah, dan semua *non-tarif barrier* yang diganti dengan *tarif barrier* secara bertahap diturunkan menjadi nol (0) persen. *Non-tarif barrier* yang masih diperbolehkan adalah hanya SPS dan TBT, serta hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kebudayaan. Oleh karena itu produk dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan sub-sektor peternakan dan kesehatan hewan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan (*safety*), standard

mutu (*quality*), kesejahteraan hewan (*animal welfare*), ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara yang bebas penyakit PMK dan BSE ternyata belum mampu memanfaatkan kondisi ini untuk menjadi negara eksportir daging, bahkan justru sebaliknya masih menjadi negara importir daging dan sapi bakalan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu PSDS 2014 harus dijadikan momentum untuk mewujudkan Indonesia, dalam jangka panjang, menjadi negara eksportir seperti pada masa sebelum tahun 1980-an.

Pelaku utama dalam tataniaga daging dan ternak hidup sapi sangat berbeda. Sapi hidup banyak dikuasai oleh peternakan rakyat (berskala kecil). Daging sapi dikuasai oleh para pedagang khusus. Untuk daging impor para importir yang tergabung dalam Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia (ASPIDI). Untuk ternak sapi bakalan organisasi yang berperan adalah Asosiasi Feedloter Indonesia (AFINDO) dan ditingkat petani oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Peran organisasi tersebut ke depan diharapkan harus lebih nyata dalam mewujudkan PSDS 2014, melalui kegiatan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya domestik, sekaligus dalam upaya ikut memberdayakan peternak kecil di pedesaan.

1. Rantai Distribusi Dan Pemasaran Daging Impor Dan Produksi Dalam Negeri.

- a. Daging Impor :** Rantai pemasaran daging impor dapat melalui berbagai alur, diantaranya dapat secara langsung dari importir ke hotel atau restoran tertentu atau dapat juga dari importir ke distributor terlebih dahulu, kemudian didistribusikan ke hotel, supermarket, meatshop dan pedagang pengecer di pasar tradisional. Segmentasi pemasaran daging berdasarkan kualitas pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : (i) *Prime cut meat* untuk hotel berbintang, cafe, catering dan supermarket; (ii) *Secondary cut meat* untuk *meatshop*, pasar tradisional, rumah tangga; (iii) *Variation meat* khususnya jenis *trimming meat dominan* digunakan untuk

bahan baku industri pengolahan daging seperti kornet, sosis, bakso; (iv) *Offal* digunakan pada industri pengolahan dan industri kuliner tradisional seperti konro, coto, rujak cingur, sop buntut, dan bakso.

Pada hari-hari besar keagamaan permintaan daging impor umumnya meningkat untuk kebutuhan rumah tangga.

- b. Produksi Dalam Negeri:** Produksi daging dalam negeri berasal dari berbagai rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan. Walaupun demikian sebelum memasuki RPH dan TPH ternak hidup berasal dari peternak yang kemudian dibeli oleh belantik kampung sebagai pengepul. Dari belantik kampung ini langsung masuk ke pasar hewan atau dibeli oleh pedagang besar antar daerah. Selanjutnya pedagang besar antar daerah tersebut ternak diperdagangkan dengan memperoleh margin keuntungan. Pada belantik kampung ternak dibawa ke pasar hewan dan terjadi transaksi dengan para pembeli atau jagal yang selanjutnya oleh jagal dibawa ke rumah potong hewan untuk dipotong. Dari RPH maupun TPH tersebut daging masuk kepada pengecer daging dan ke pasar-pasar becek yang akan dibeli oleh para konsumen hari itu juga.

2. Kebijakan Fiskal atas Produk atas Daging Sapi dan Sapi Hidup.

- a. Daging Sapi:** Dalam Kebijakan Fiskal dan perdagangan yang ditetapkan untuk daging impor, ada pengenaan tarif biaya masuk sebesar 5% sedangkan untuk jeroan ternyata disamakan dengan jenis daging. Dimasa mendatang, dalam rangka pengendalian impor, maka untuk jenis jeroan seharusnya dikenai tarif biaya masuk di atas 5%, dan dengan proporsi yang semakin menurun.
- b. Sapi Hidup:** Untuk sapi hidup dapat berupa sapi bibit dan *feeder cattle*. Impor sapi bibit diperlukan untuk usaha pembibitan atau usaha perkembangbiakkan menghasilkan sapi bakalan, sehingga dikenakan tarif 0%. Impor *feeder cattle* sejauh dapat dijadikan sapi bakalan juga dikenakan tarif biaya masuk 0%, dengan syarat berat badan maksimal 350 kg.

Kegiatan penggemukan akan memberi nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Ternyata usaha ini juga mempunyai daya saing yang cukup tinggi karena biaya pakan yang relatif cukup murah, terutama bila bahan-bahan penyusun ransum menggunakan limbah pertanian atau produk yang berasal dari dalam negeri.

3. Strategi Perluasan *Harmonization System* (HS) Daging Sapi

Dalam upaya menurunkan angka impor diperlukan penyesuaian *Harmonization System* (HS) *number* yang merupakan sistem penomoran produk sesuai dengan spesifikasinya, terhadap beberapa item yang diperlukan. Dengan demikian jenis item tertentu yang tidak diperlukan tidak perlu tercantum dalam HS number, sehingga pengendalian impor terhadap jenis daging tertentu dapat efektif dilaksanakan.

E. Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Untuk mendukung tercapainya tujuan PSDS 2014, beberapa kebijakan dan peraturan yang terkait dengan program pengembangan sapi potong akan tetap dilanjutkan. Jika diperlukan, kebijakan atau peraturan lain akan dikeluarkan untuk melengkapi atau mendukung kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Beberapa kebijakan tersebut melingkupi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pemasukan dan Pengeluaran Daging Sapi dan Sapi Hidup

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, pemerintah melakukan kebijakan importasi daging dan sapi bakalan dari luar negeri, khususnya dari Australia dan New Zealand (untuk sapi bakalan). Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi harga daging sapi yang semakin meningkat. Menurut UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), importasi sapi bakalan memang dapat dilakukan dari negara manapun jika memenuhi semua persyaratan dan mengikuti tatacara pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pemasukan dan pengeluaran daging sapi dapat dilakukan dengan mengacu pada Permentan No. 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri, tanggal 8 April 2009. Peraturan ini mencakup 7 ruang lingkup pengaturan yang meliputi: (i) jenis karkas, daging dan/atau jeroan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; (ii) persyaratan pemasukan yang mengatur tentang pelaku pemasukan; (iii) kriteria negara dan/atau zona asal; (iv) persyaratan unit usaha di negara asal dan persyaratan kemasan/label dan pengangkutan; (v) tatacara pemasukan; (vi) tindakan karantina hewan; serta (vii) pengaturan tentang pengawasan peredarannya dan sanksi bagi pelanggaran peraturan. Permentan ini setiap saat dapat disempurnakan atau ditinjau kembali agar PSDS 2014 dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Untuk pengeluaran ternak dari wilayah RI, UU No. 18/2009 tentang PKH menyatakan bahwa pengeluaran benih, bibit dan/atau bakalan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah dapat dicukupi dan kelestarian ternak lokal dapat terjamin.

Dalam operasionalisasinya sesungguhnya hal ini telah diatur dengan Permentan No. 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong, tanggal 30 Januari 2008. Peraturan ini mengatur tentang: (i) syarat dan tatacara pemasukan serta pengeluaran benih, bibit ternak dan sapi potong; (ii) mengenai pengemasan dan pengangkutan; (iii) pengawasan dan ketentuan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Sedangkan kebijakan pengeluaran untuk ternak bibit dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah dapat dipenuhi berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Dirjen Peternakan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak Nasional (Kombitnak) dan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (Komnas SDG).

Pemasukan dan pengeluaran daging dan sapi hidup dari dan ke wilayah NKRI telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dan kebijakan. Akan tetapi beberapa peraturan pelaksanaan, seperti Kepmen atau Permentan yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi PSDS 2014 dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan dinamika yang ada. Beberapa peraturan perundangan dimaksud antara lain adalah:

- a. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- c. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
- e. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- f. Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan/atau Jeroan dari Luar Negeri
- g. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong
- h. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Karantina Hewan
- i. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri

Dalam rangka mempertahankan status daerah bebas Brucellosis, maka perlu dilakukan pengamatan penyakit yang teratur dan berkesinambungan serta melaksanakan tindak pencegahan dan penolakan penyakit yang ketat dan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- a. Kepmentan Nomor 443 Tahun 2002 tentang Pembebasan Pulau Bali bebas dari penyakit Brucellosis

- b. Kepmentan Nomor 444 Tahun 2002 tentang Pembebasan Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat bebas dari penyakit Brucellosis
- c. Kepmentan Nomor 97 Tahun 2006 tentang Pembebasan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat bebas penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
- d. Kepmentan Nomor 2540 Tahun 2009 Pernyataan Pulau Kalimantan bebas penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
- e. Kepmentan Nomor 2541 Tahun 2009 tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau bebas penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau.

2. Pembibitan dan Pembesaran

Kebijakan pembibitan sapi potong mengacu kepada UU No.18/2009, dimana Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan bakalan. Dalam keadaan tertentu, pemasukan benih/bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keragaman genetik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi kekurangan benih/bibit dalam negeri dan memenuhi keperluan untuk penelitian dan pengembangan.

Pembibitan sapi potong diselenggarakan berdasarkan sistem perbibitan nasional yang tertuang dalam Permentan No. 36/Permentan/Ot.140/8/2006, tentang Sistem Perbibitan Nasional, tanggal 31 Agustus 2006. Sistem ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada peternak untuk mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan dan dapat mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan/atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun hal-hal yang diatur dalam Permentan tersebut meliputi: (i) pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG); (ii) pemuliaan ternak; (iii) produksi dan peredaran benih

dan bibit ternak; (iv) wilayah sumber bibit; (v) kelembagaan perbibitan; (vi) standarisasi dan sertifikasi bibit; serta (viii) pengawasan.

Dalam usaha pembibitan ternak, pemerintah selain berperan sebagai regulator dan fasilitator, juga bertindak sebagai penyedia benih/bibit unggul. Benih untuk sapi potong dapat berupa semen atau embrio yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan usaha penyediaannya dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, pusat perbibitan (pusat dan daerah), swasta/koperasi atau oleh masyarakat dalam bentuk pembibitan rakyat (*Village Breeding Centre/VBC*).

Pembibitan Pemerintah

Pembibitan ternak sapi potong yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UPT untuk memproduksi benih dan UPT yang memproduksi bibit ternak. Produksi benih diselenggarakan oleh 3 (tiga) UPT pusat yaitu Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang didukung oleh beberapa BIB Daerah. Saat ini terdapat 14 (empat belas) BIBD yaitu di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur.

Produksi bibit ternak sapi potong yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas di Sumatera Barat, BPTU Sembawa di Sumatera Selatan, BPTU Sapi Aceh Indrapuri di NAD dan BPTU Sapi Bali di Jembrana Bali. BPTU ini merupakan sumber bibit sapi potong yang harus mampu menyediakan bibit unggul, melakukan seleksi dan perbaikan mutu secara terprogram. Dalam menjalankan tugasnya, UPT-UPT Perbibitan tersebut harus dikawal oleh peneliti dari Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian lainnya yang kompeten.

Pembibitan Swasta

Pembibitan swasta dilakukan oleh perusahaan pembibitan yang harus memiliki persetujuan prinsip, ijin usaha dan ijin perluasan peternakan, memiliki sapi potong lebih dari 100 ekor, usahanya tidak bertentangan dengan RUTR/RDTR daerah setempat untuk menghindari konflik sosial dikemudian hari serta mampu melaksanakan usahanya sesuai dengan *Good Breeding Practices* (GBP). Belum banyak pihak swasta yang berminat melakukan usaha pembibitan sapi potong di Indonesia karena terkendala modal, lamanya perputaran usaha dan margin yang tidak terlalu besar.

Oleh karenanya Pemerintah telah melakukan upaya fasilitasi dalam penyediaan kredit usaha pembibitan sapi potong (KUPS). Pemerintah menyadari bahwa melalui usaha pembibitan maka populasi dan kualitas genetik ternak dapat ditingkatkan dan usaha ini akan secara signifikan mendorong usaha penggemukan secara berkesinambungan. KUPS merupakan skim kredit Perbankan dengan suku bunga bersubsidi yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009. Untuk mempermudah pelaksanaannya maka Menteri Pertanian mengeluarkan Permentan No. 40/Permentan/ PD.400/9/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS, tertanggal 8 September 2009.

Dengan dikeluarkannya 2 buah peraturan tersebut maka diharapkan usaha pembibitan sapi yang dilakukan oleh pihak swasta/koperasi dapat berjalan baik. Mengacu pada peraturan KUPS, disyaratkan swasta/koperasi yang memanfaatkan skim kredit tersebut harus bermitra/kerjasama dengan kelompok peternak/gabungan kelompok peternak dengan prinsip saling menguntungkan dimana swasta/koperasi berperan sebagai pembina/pengayom kelompok/gabungan kelompok.

Pembibitan Rakyat

Pembibitan sapi potong yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok atau perorangan dengan menerapkan prinsip pembibitan dilakukan

dengan pola ***Village Breeding Centre (VBC)***. Pola ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan melalui fasilitasi Pemerintah dalam penambahan bibit, pencatatan (recording), tatacara seleksi, perbaikan sistem perkawinan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Program pembibitan sapi potong yang dilakukan masyarakat dikemas dalam program aksi perbibitan yang diaplikasikan melalui dana bantuan program atau bantuan sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Kabupaten/Kota yang potensial untuk dikembangkan pembibitan sapi.

3. Penggemukan

Kebijakan Pemerintah lainnya yang mendukung upaya pencapaian PSDS 2014 adalah terus memfasilitasi pengembangan usaha penggemukan. Usaha ini dilakukan baik oleh pihak swasta/koperasi yang pada umumnya melakukan importasi sapi bakalan maupun oleh kelompok-kelompok peternak sapi potong skala kecil/menengah yang mendapat fasilitasi dari Pemerintah (pusat dan daerah) dengan memanfaatkan sapi lokal dan hasil IB.

Usaha penggemukan sapi bakalan yang dilakukan oleh para importir sapi potong harus dilakukan sekitar 3 bulan atau lebih, sehingga sapi dengan bobot awal kurang dari 350 kg tersebut mencapai bobot potong sekitar 500-600 kg. Kegiatan penggemukan dilakukan oleh para pengusaha itu sendiri ataupun oleh kelompok-kelompok peternak sapi potong di sekitarnya yang menjadi plasma dari perusahaan. Dengan demikian ada nilai tambah yang dapat diambil dari kegiatan importasi sapi bakalan bagi para peternak rakyat untuk turut menggemukan sapi-sapi ex-impor tersebut.

Usaha penggemukan dan pembibitan yang dilaksanakan oleh rakyat juga dilakukan di kelompok-kelompok peternak dengan fasilitasi Pemerintah melalui PMUK, Sarjana Membangun Desa (SMD), PUAP serta fasilitasi pembiayaan melalui kredit KKP-E, KUR, KUPS atau program-program lainnya yang spesifik di daerah. Pola-pola yang setelah dilakukan evaluasi ternyata secara nyata dapat

meningkatkan populasi dan produksi akan terus dikembangkan, sedangkan pola yang kurang berhasil akan diperbaiki atau digantikan dengan pola lainnya.

Usaha penggemukan yang dilakukan pengusaha skala menengah atau oleh organisasi-organisasi yang telah berhasil seperti di NTT (PUSKUD), Jawa Tengah (Puspetasari), Jawa Timur, DIY, dsb., perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam usaha ini peternak telah mampu meningkatkan bobot potong lebih dari 30-50%. Sapi Bali yang biasanya dipotong pada bobot 200 kg, ternyata secara ekonomis masih layak untuk dipotong pada saat mencapai bobot 300 kg. Bahkan secara genetik sapi Bali berpotensi mencapai bobot potong diatas 500 kg. Sapi silangan hasil IB yang biasa dipotong pada saat mencapai bobot 400-an kg, ternyata secara teknis maupun ekonomis dapat ditunda sampai mencapai bobot diatas 600 kg. Dengan demikian, dalam jangka pendek dan menengah, tunda potong berpotensi sangat besar dalam mendukung PSDS 2014.

4. Produksi dan Pemotongan di RPH

Upaya lain dalam rangka penyediaan bibit dalam negeri adalah melalui seleksi ternak betina produktif untuk usaha perkembangbiakkan atau *cow calf operation*, sedangkan yang tidak produktif dijadikan ternak potong. Hal ini sesuai mandat yang dinyatakan dalam UU N0.18/2009 tentang PKH (pasal 18) adalah larangan penyembelihan ternak betina produktif kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Disadari bahwa salah satu kendala dalam pencapaian program P2SDS 2010 adalah masih banyaknya pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat pemotongan hewan (TPH) yang masih banyak dijumpai di beberapa daerah. Upaya pencegahan pemotongan di RPH atau TPH waktu itu belum banyak mendapat kemajuan karena belum ada sanksinya. Oleh karena masih perlu upaya lebih lanjut untuk pelaksanaan pencegahan pemotongan ini, melalui *law enforcement* yang lebih tegas atau menerapkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sesuai dengan UU

No.18/2009. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan penyediaan dana talangan untuk melakukan penjarangan sapi-sapi betina produktif yang akan dijual masyarakat, menampungnya di UPT Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit di daerah ybs, atau didistribusikan di wilayah lainnya.

Beberapa tahun yang lalu, Pemerintah (pusat dan daerah) telah melakukan upaya pengalokasian dana talangan untuk pembelian sapi-sapi betina produktif yang dijual masyarakat di RPH (kebijakan tunda potong), namun karena adanya keterbatasan dana yang di alokasikan, maka kegiatan ini terhenti dalam lingkup yang masih kecil dan belum menyentuh pada TPH atau RPH yang ilegal. Pola ini akan diteruskan pada program PSDS 2014 dengan beberapa perbaikan pada pelaksanaannya di lapangan. Selain penggelontoran dana talangan dan skema PSO (*Public Service Obligation*), Pemerintah juga akan terus memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui program InKA dan penguasaan teknologi IB dan pelayanan IB yang lebih memuaskan bagi peternak sapi potong sehingga mereka akan berfikir ulang jika ingin menjual ternaknya.

Kebijakan lain yang akan diperkuat operasionalisasinya adalah hal-hal yang terkait dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986, tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan, tanggal 9 September 1986. Peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pembangunan RPH dan klasifikasi usaha pemotongan hewan yang saat ini sangat banyak yang statusnya ilegal dan harus dilakukan penataan agar pengawasan pemotongan betina produktif dapat segera diatasi.

Dalam pencapaian PSDS kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait baik langsung atau tidak langsung dengan aspek produksi dan pemotongan di RPH perlu dioptimalkan penerapannya dan/atau dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Beberapa kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait, terutama yang berkenaan dengan :

- a. Pengawasan pemotongan ternak sapi betina produktif di RPH;
- b. Kebijakan tunda potong di RPH terhadap sapi jantan dengan bobot hidup yang belum optimal, sehingga dapat menstimuliir kegiatan penggemukan, sekaligus meminimalkan pemotongan sapi yang terlalu tua yang akan mempengaruhi kualitas daging.
- c. Koordinasi penetapan HS number dengan instansi terkait.
- d. Kebijakan dan peraturan penerapan identifikasi ternak sehingga populasi dan mutasi ternak dapat terkontrol.
- e. Kebijakan penetapan jatah pengeluaran ternak potong dan bibit dari daerah sumber, agar pengurasan ternak dapat dicegah.
- f. Kebijakan penetapan lahan usaha bidang peternakan dan pelayanan oleh petugas veteriner, antara lain :
 - 1) Pemetaan untuk lahan penggembalaan, usaha budidaya dan pembibitan;
 - 2) Penetapan tata ruang (RUTR/RDTR) untuk lokasi RPH dan RPU;
 - 3) Penetapan batasan ekspor komponen tertentu terkait dengan bahan pakan ternak.
 - 4) Kebijakan evaluasi dan penetapan zona/kompartemen bebas penyakit hewan tertentu.
 - 5) Penetapan satuan minimum pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesmavet.

5. Industri pengolahan daging

Dalam hal pengembangan industri pengolahan daging, Pemerintah akan terus memfasilitasinya dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah akan terus membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara indutri pengolahan daging dengan peternak budidaya, sehingga peternak akan berhubungan langsung dengan industri dan memutus

rantai tataniaga yang cukup panjang, karena hal ini akan meningkatkan margin peternak.

6. Produk sampingan

Produk sampingan yang dihasilkan dari usaha budidaya atau pemotongan sapi berupa kulit, tanduk dan tulang. Saat ini produk sampingan usaha budidaya sapi potong telah menjadi nilai tambah bagi peternak dan dimanfaatkan oleh industri, khususnya industri penyamakan kulit (*tannery*) sebagai bahan baku pembuatan tas, jaket, dan juga alas kaki. Produk kulit dalam negeri sudah banyak diekspor untuk menghasilkan devisa negara. Industri alas kaki dengan total investasi Rp. 3 triliun juga dapat menyerap tenaga kerja sekitar 450 ribu orang dan memiliki nilai ekspor USD 1,6 milyar.

Terhadap industri produk hewan non pangan, Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap produk sampingan tersebut agar masyarakat dapat terlindungi dari penyalahgunaan produk non pangan tersebut untuk pangan, mencegah pencemaran lingkungan, dan pengendalian resiko zoonosis. Pemerintah juga mengawasi produk yang masuk dari luar negeri dan beredar di Indonesia sebagai alat pencegahan dan pengendalian masuknya penyakit hewan eksotik dan zoonosis. Selain itu Pemerintah juga akan terus mendorong tumbuhnya industri ini karena nilai tambah yang dapat diterima peternak cukup baik dan tentunya akan lebih menggairahkan usaha peternakan itu sendiri.

Produk sampingan lain yang dihasilkan oleh peternakan sapi potong adalah manure atau kotoran hewan. Sejak tahun 2007 Pemerintah telah meluncurkan program pemanfaatan kotoran hewan sebagai bahan baku pembuatan bio-gas (Program Batamas). Program ini akan terus dilanjutkan melalui bantuan dana untuk pembuatan instalasi biogas dan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan.

Selain itu untuk mengatasi permasalahan seperti langka dan mahalnya pupuk an-organik serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan pupuk an-

organik secara terus menerus terhadap kesuburan tanah, maka Departemen Pertanian RI telah mencanangkan program pembuatan pupuk organik, termasuk pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan (pupuk kandang). Program pengembangan pupuk organik dilakukan melalui fasilitasi Pemerintah kepada kelompok-kelompok peternak sapi potong untuk pembangunan rumah kompos, pembibitan, dan juga melengkapi sarana pendukungnya serta pelatihan-pelatihan.

Kearifan tradisional dalam mengembangkan industri kompos dapat dijumpai di daerah Wonosobo dan Temanggung, yaitu peternakan sapi sistem *kereman*. Peternakan seperti ini dapat berkembang karena petani sangat menyadari pentingnya pupuk organik untuk usaha hortikultura. Dalam sistem ini sapi dipelihara dengan cara dikandangkan selama masa pemeliharaan. Usaha ini mengasosiasikan sapi sebagai mesin pengolah limbah pertanian dengan output utama kompos dan dengan bonus sapi potong yang gemuk dan berkualitas.

F. Kendala dan Peluang Teknis, Investasi dan Pengembangan Pasar

Analisa **SWOT** (*strength, weakness, opportunity, and threath*) yang didukung dengan pengalaman masyarakat di lapang dan adanya bukti empiris menunjukkan bahwa peluang untuk swasembada daging pada tahun 2014 masih cukup realistis.

Strength (kekuatan) yang dapat dipergunakan untuk mencapai swasembada daging sapi antara lain adalah: (i) Terdapat beberapa rumpun (bangsa atau *breed*) sapi lokal yang sangat adaptif dan produktif, seperti Sapi Bali, Sapi Peranakan Ongole (PO), Sapi Madura, Sapi Pesisir, Sapi Aceh, dan sapi persilangan hasil IB, (ii) Melimpahnya rerumputan di padang pangonan dan kawasan perkebunan; serta tersedianya limbah pertanian dan hasil samping agroindustri yang dapat dipergunakan sebagai bahan pakan, yang saat ini justru masih terbengkelai atau digunakan untuk tujuan non-pertanian, dan (iii) Tersedianya SDM peternak yang sudah berpengalaman dan tenaga terdidik yang dapat ditempa untuk menjadi peternak maju.

Weakness (kelemahan) yang cukup menonjol dan merupakan masalah yang harus diatasi meliputi: (i) kematian pedet pada musim kering di beberapa wilayah masih sangat tinggi berkisar antara 20-40 persen, dan kematian induk masih lebih dari 10-20% akibat kurang pakan atau serangan penyakit, (ii) ketidakpedulian sebagian jagal yang sering memotong sapi betina produktif (SBP) karena harganya lebih murah dibanding sapi jantan, (iii) banyaknya sapi muda yang dipotong pada saat belum mencapai bobot optimalnya sehingga sapi hanya memproduksi daging sekitar 60-80 persen dari potensi maksimalnya, (iv) produktivitas yang masih sangat variatif, antara lain sapi persilangan hasil IB yang dipelihara dengan cara seadanya, serta (iv) langkanya sapi jantan di daerah sumber bibit pada pola pemeliharaan ekstensif (*grazing/digembalakan*), karena semua sapi jantan dijual atau dipotong. Selain itu peternak sering menjual sapi dalam kondisi apapun (bunting, produktif, atau muda) bila memerlukan uang cash. Di beberapa daerah masih sering dijumpai pemotongan ternak di luar RPH, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Hal ini secara signifikan akan menguras populasi ternak produktif yang semestinya masih harus dikembangbiakkan. Kawasan padat ternak di NTT, NTB dan Jawa sering mengalami kesulitan pakan dan air pada saat musim kemarau.

Opportunity (peluang) untuk mengembangkan usaha atau industri sapi potong masih sangat besar karena permintaan daging yang terus meningkat, seiring dengan perkembangan ekonomi, kesadaran gizi dan perubahan gaya hidup. Pemasaran daging di dalam maupun luar negeri juga masih terbuka lebar, terkait dengan upaya untuk melakukan substitusi impor atau promosi ekspor. Beberapa wilayah yang berlimpah bahan pakan saat ini masih kekurangan ternak, seperti di Sumatera, Kalimantan, Papua (Merauke), dlsb. Areal persawahan, tegalan, atau perkebunan yang menghasilkan limbah atau hasil samping yang dapat digunakan sebagai pakan sangat potensial untuk mengembangkan agribisnis sapi potong pola integrasi tanaman ternak (*crop livestock system, CLS*).

Peluang yang sangat besar ini juga memperoleh dukungan politik, sehingga berpotensi untuk memperoleh alokasi anggaran yang lebih memadai dan bantuan

kerjasama dengan instansi, lembaga atau kementerian lain (ESDM, Koperasi, Sosial, dsb.) maupun swasta, untuk mewujudkan PSDS 2014.

Threat (ancaman) yang paling menonjol adalah masuknya daging dan jeroan yang mungkin sebagian tidak terjamin ASUH atau produk illegal yang masuk dari kawasan perbatasan, serta membanjirnya sapi bakalan yang sebagian tidak berkualitas sebagai *feeder cattle*. Sistem karantina yang menggunakan IKHS (Instalasi Karantina Hewan Sementara) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip karantina dalam pencegahan penyakit hewan menular atau penyakit eksotik. Selain itu ada ancaman terselubung yang meramalkan bahwa ke depan ketergantungan pada impor dapat mencapai 70 persen. Ancaman yang sangat menantang ini harus dijadikan cambuk untuk melakukan lompatan katak (*frog leap*) sehingga produksi daging sapi lokal di dalam negeri dapat meningkat dengan tajam. Ancaman penyakit eksotik juga masih perlu terus diwaspadai, terutama PMK dan BSE (sapi gila), maupun penyakit lain yang masuk dalam List A dari OIE.

Sapi lokal Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan sehingga pemberdayaan sapi lokal menjadi unsur paling penting untuk dapat berkompetisi dengan produk impor.

1. Potensi Pengembangan Sapi Lokal

Sapi lokal yang ada terdiri dari sapi Bali (sekitar 33,73%), sapi PO dan keturunannya (23,88%), sapi Madura (5,96%), dan sapi lokal lainnya (13,45%) seperti sapi pesisir dan sapi Aceh, serta sapi persilangan (22,97%). Wilayah penyebaran sapi Bali hampir di seluruh Indonesia kecuali pulau Jawa. Sapi PO banyak dikembangkan di pulau Jawa dan di beberapa provinsi lainnya sedangkan sapi Madura tersebar di pulau Madura, Jawa Timur dan Kalimantan.

Sapi Bali memiliki potensi sangat besar dan banyak dipelihara oleh masyarakat. Sapi Bali mampu beradaptasi dalam keadaan paling buruk sekalipun terutama pada musim kemarau seperti di wilayah Indonesia Timur. Daya fertilitasnya juga cukup tinggi sehingga setiap tahun sapi ini mampu beranak. Sapi Madura dan sapi PO ternyata memiliki daya tahan yang hampir

serupa dengan sapi Bali. Namun berat dan kualitas karkas terbaik terdapat di sapi Bali.

Potensi pengembangan sapi lokal juga didukung oleh ketersediaan pakan dan lahan. Potensi pakan yang ada diantaranya berupa Tanaman Pakan Ternak (TPT), Limbah Tanaman Pangan (LTP) seperti jagung, padi, dan kedelai serta limbah perkebunan sawit yang berjumlah 89,20 juta ton bahan kering/thn. Diperkirakan masih terdapat kelebihan potensi pakan sebesar 68 juta ton bahan kering/thn. Potensi ini secara teoritis mampu untuk menampung tambahan ternak sapi 39,76 juta ekor, namun dalam memanfaatkan potensi ini perlu dilakukan pemilahan dan pemilihan pada wilayah yang layak teknis maupun ekonomis.

Sapi lokal Indonesia ternyata juga bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan sapi gila (*mad cow*). Namun demikian, sapi lokal Indonesia masih mendapat ancaman dari anthraks, ngorok, dan Brucellosis walaupun secara pulau per pulau telah dinyatakan bebas tergantung jenis penyakit dan tempatnya.

2. Pengaturan/Regulasi Ratio Produksi Daging Sapi Dalam Negeri Dan Kompetisi Dengan Produk Impor

Secara nasional populasi sapi potong dari tahun 1994-2002 telah mengalami penurunan sebesar 3,1% pertahun. Penurunan populasi ini banyak terjadi pada wilayah sentra produksi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Lampung, dan Bali. Kemudian selama tahun 2002-2009, menurut data BPS, populasi ternak kembali meningkat tipis (1,8-2,2%).

Sementara itu impor sapi bakalan daging selama 10 tahun terakhir ini telah meningkat tajam. Pada tahun 2000, impor sapi bakalan mencapai 200 ribu ekor, daging dan jeroan 40 ribu ton. Angka ini melonjak drastik pada sekitar tahun 2008 yaitu impor sapi bakalan mencapai 600 ribu ekor, daging dan jeroan 70 ribu ton. Apabila situasi ini tidak kita benahi maka diperkirakan pada tahun 2014 hampir 50% sapi potong dalam negeri didominasi oleh sapi impor .

Regulasi tentang pemberdayaan ternak lokal sangat diperlukan untuk membuat sapi lokal mencapai performance sebenarnya. Perlu mulai dianalisis tentang sejauh mana peningkatan populasi dan produksi ternak dalam negeri mampu secara bertahap mengurangi impor. Pada saat ini kinerja ternak lokal masih relatif sangat rendah, misalnya: angka kelahiran hanya sebesar 21% (menurut SPN) dari yang seharusnya mencapai 30%; berat karkas sapi dewasa siap potong hanya sebesar 141 kg (bandingkan dengan sapi hasil IB yang dapat mencapai 300 kg); calving interval sangat panjang (18-24 bulan) pada hal seharusnya bisa diperpendek lagi menjadi 13-14 bulan.

Kompetisi antara sapi lokal dengan produk impor berupa sapi maupun daging akan terus terjadi. Pada kompetisi ini yang sangat memegang peranan adalah daya saing, khususnya dalam pengadaan *feeder cattle* dan proses penggemukan yang lebih cepat dan efisien. Pada saat ini impor diperlukan karena produksi dalam negeri tidak mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Impor diperlukan juga untuk memberikan tambahan tekanan persaingan kepada produsen ternak lokal agar mereka dapat memproduksi efisien.

Pengendalian impor akan dijalankan sesuai dengan aturan perdagangan internasional dengan memanfaatkan *tariff* maupun *non-tariff barrier* secara benar, tepat dan adil. Oleh karena itu penerapan tarif bea masuk akan dijalankan secara proporsional, sedangkan penerapan kuota akan menyesuaikan peraturan perdagangan internasional dan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya. Penerapan *non tariff barrier* hanya akan dikenakan sesuai dengan prinsip SPS dan Halal. Mengingat pentingnya komoditas ternak sapi potong bagi masyarakat Indonesia, kebiasaan untuk pengendalian impor tersebut perlu dilakukan karena impor sapi potong dapat menguras devisa negara dan menimbulkan dampak yang bersifat efek domino yaitu menghambat pendapatan ternak dalam negeri, menghilangkan kesempatan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menghambat program-program pengentasan kemiskinan.

Lebih jauh lagi, impor untuk konsumsi domestik akan diarahkan hanya 10% dari total kebutuhan nasional dan hanya untuk memenuhi segmen pasar tertentu saja yang memang tidak dapat diisi oleh daging lokal. Hal ini hanya dapat diwujudkan bila produksi daging di dalam negeri dapat ditingkatkan melalui: (i) mengurangi angka kematian; (ii) mencegah pemotongan betina produktif; (iii) menunda potong agar bobot potong sesuai potensi genetiknya; (iv) meningkatkan produktivitas; serta (v) meningkatkan mutu genetik.

Regulasi lainnya yang dapat ditempuh adalah terus menertibkan pemotongan ternak betina produktif dengan pendekatan sosial budaya setempat dan melarang ekspor sapi betina produktif terutama sapi lokal yang sudah terbukti keunggulannya terutama sapi Bali yang memungkinkan negara pengimpor menjadi kompetitor di kemudian hari. Dari sisi kesehatan hewan dalam rangka pengamanannya, masuknya daging atau ternak dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya terutama PMK, BSE, dan penyakit eksotik lainnya perlu dicegah atau dilarang.

3. Pengembangan Sistem Insentif Bagi Pengembangan Pemasaran Sapi Hidup Dan Regulasi Pemotongan Ternak

Sistem insentif yang akan dikembangkan bagi pemasaran sapi hidup akan terkait dengan aspek hulu (misalnya perbibitan), budidaya, dan kegiatan di hilir. Di segmen hulu, insentif diberikan dalam bentuk pengembangan pembibitan sapi dalam negeri melalui berbagai fasilitas yaitu KKPE, KUPS dan berbagai kredit lainnya. Insentif yang akan diberikan juga dapat bersifat indirect dari pemerintah berupa penyediaan bibit unggul dari berbagai pusat-pusat pembibitan dalam negeri dan penyediaan semen beku yang dihasilkan oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) untuk menjamin kualitas bibit. Pada segmen budidaya, fasilitasi kredit yang dapat dimanfaatkan adalah KKPE dan berbagai skim kredit lainnya. Pemerintah juga telah membangun kawasan usaha budidaya ternak di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Pengendalian penyakit yang merupakan salah satu kendala akan dijamin oleh pemerintah

pelayanannya sehingga tidak lagi menimbulkan wabah penyakit. Selain itu, penyakit yang sifatnya sporadis secara bertahap akan dibebaskan. Pada segmen hilir, pemerintah secara bertahap memperbaiki berbagai RPH dan meniadakan TPH serta menerapkan prinsip-prinsip Higienis dan sanitasi dalam bentuk penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.

Untuk regulasi pemotongan ternak, pendekatan *law enforcement* dan ekonomi perlu diterapkan. Sebagai contoh, di berbagai RPH akan dilakukan penjarangan sapi betina produktif. Sapi tersebut dibeli oleh pemerintah atau memanfaatkan skim kredit yang ada untuk dapat dikembangbiakkan lagi oleh masyarakat dan menghasilkan anak. Regulasi juga akan ditetapkan pada batasan umur dan standar bobot potong untuk mencegah terpotongnya ternak yang masih muda dan ternak yang bobot badannya rendah. Ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan usaha budidaya yang baik.

Pengembangan sistem insentif sebagai stimulus sangat diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan / regulasi pemotongan ternak antara lain :

- a. Regulasi pelarangan pemotongan sapi betina produktif;
- b. Kebijakan penerapan tunda potong terkait dengan berat potong optimal untuk kelompok penggemukan ternak sapi.
- c. Kebijakan yang mengatur ketersediaan sapi siap potong di berbagai daerah untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas harga.
- d. Kebijakan pengembangan pemasaran ternak yang mendorong iklim penentuan harga ternak berdasarkan berat badan serta mendorong terwujudnya sistem pelelangan ternak.
- e. Kebijakan sistem pemantauan harga daging yang ditetapkan secara terkoordinatif dengan Departemen Perdagangan dan Badan Pusat Statistik

4. Investasi Pada Industri Penggemukan, Pemotongan, Dan Pengolahan

Investasi pada industri penggemukan, pemotongan dan pengolahan pada dasarnya tergantung pada sistem produksi. Namun demikian, sistem produksi

di setiap wilayah belum terpetakan secara baik terutama untuk wilayah pembibitan, wilayah penggemukan, wilayah campuran, dan wilayah pembesaran. Oleh karena itu, kendala utama dalam investasi di berbagai industri sapi potong tersebut belum dapat tergambar dengan baik. Yang jelas, ada 3 pelaku investasi dalam pengembangan agribisnis sapi yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Investasi pemerintah dalam agribisnis sapi diantaranya pada pelayanan kesehatan hewan, penyediaan bibit unggul, kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan serta penyuluhan dan pendampingan pada berbagai aspek yaitu breeding, reproduksi, pakan dan manajemen pemeliharaan, serta pengembangan kelembagaan. Pihak swasta sampai saat ini belum menunjukkan minat yang tinggi dalam pengembangan usaha *cow calf operation* sehingga masih memerlukan fasilitas pemerintah. Swasta juga dapat berinvestasi dalam bidang usaha budidaya, usaha penyediaan calon induk, pabrik pakan mini, industri pengolahan daging, kulit, kompos dan lainnya. Peran penting swasta yang diharapkan adalah bermitra dengan para peternak yang menghasilkan sapi bakalan. Pola ini oleh swasta diterapkan dalam pengembangan sapi integrasi sesuai dengan kondisi setempat. Investasi swasta juga akan terlibat dalam usaha penyediaan bibit ex-impor, penggemukan yang membutuhkan padat modal, dan perputaran uang yang cepat.

Namun demikian, investasi pada pemotongan dan pengolahan masih terkendala oleh belum berfungsinya RPH sebagai unit yang sepenuhnya memenuhi pelayanan publik. Selama ini RPH yang ada masih berorientasi kepada pendapatan di daerah sehingga investasi pemotongan dan pengolahan yang menuntut kualitas daging tertentu tidak tercapai. Kendala lainnya pada sisi konsumsi, dimana konsumen lebih menyukai daging segar tidak ditiriskan dan tidak dibekukan. Ini terlihat dari angka retensi indeks daging yang 80% tidak dapat diolah. Untuk menggambarkan investasi dari ke-3 pelaku tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Gambaran Investasi Agribisnis Sapi Potong

Bidang Investasi	Pemerintah (10%)	Swasta (20-30%)	Masyarakat (60-70%)
Peningkatan Populasi dan Produktivitas Sapi Potong	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur dan prasarana - Keswan - Bibit dan Perbibitan - Inovasi, Informasi, Kelembagaan dll. - Kebijakan Impor daging dan sapi bakalan, serta ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik pakan, alat dan obat - Kandang - Gudang - Peralatan - Ternak - Pakan dan obat - Pabrik pengolahan limbah dan daging 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkandangan - Ternak - Pakan dan obat - Peralatan kandang dan bahan pembantu

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2005

G. Strategi Bisnis dan Instrumen Pendukung

1. Dukungan swasta dan masyarakat dalam membangun industri sapi potong dalam negeri

Salah satu masalah yang muncul dalam pencapaian target PSDS yang tertunda adalah terbatasnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk program ini. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat perlu digalakkan, melalui beberapa upaya seperti: (1) Pemberian insentif dalam bentuk kemudahan dalam perijinan untuk berinvestasi, (2) Fasilitasi skim kredit dengan bunga rendah, seperti KUPS, (3) Kemudahan dalam pemasukan ternak bibit, (4) Advokasi kepada Pemda untuk penataan retribusi daerah yang dapat menghambat laju perdagangan sapi potong dan produknya; (5) Terus melanjutkan program *pro-poor* untuk peternak skala kecil/menengah melalui dana APBN/APBD dan sumber dana lainnya seperti dana hibah/*grant* atau bantuan dari negara lainnya.

2. Pemanfaatan dana pemerintah, swasta/masyarakat, dan CSR

Dana pemerintah yang selama ini telah dialokasikan untuk pencapaian PSDS akan terus ditingkatkan karena program ini sudah menjadi kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden. Dengan program yang lebih terfokus dan dana yang sesuai dengan kebutuhan program, maka PSDS diharapkan akan dapat tercapai pada tahun 2014. Dana pemerintah yang akan

dimanfaatkan bukan hanya yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian namun juga dana yang ada pada Kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, dan sebagainya. Oleh karenanya pemerintah akan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait lainnya agar ada kesamaan persepsi dan program pengembangan atau distribusi sapi potong pada masing-masing instansi dapat berjalan lebih terarah.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mengandung gagasan tanggung jawab dunia usaha, yang memperhatikan kinerja terkait dengan dimensi etis, sikap ramah terhadap lingkungan dan jiwa sosial bisnis serta mengutamakan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dunia usaha (Arief Daryanto, 2009). CSR merupakan kepedulian perusahaan bukan hanya kepada kesehatan dan keselamatan pekerjanya saja, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya.

Beberapa CSR telah dijalankan oleh perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya berupa peningkatan usaha peternakan sapi potong, seperti Riau Andalan Pulp and Paper yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian terpadu termasuk pemberian hibah ternak kepada para petani yang kemudian mengembangkan usaha ternaknya secara bergulir. CSR untuk pengembangan sapi potong juga dilakukan oleh PT. Sinar Mas Tbk di beberapa daerah perkebunan kelapa sawit. Pemerintah akan terus mendorong swasta untuk mengalokasikan dana CSR perusahaan yang bersangkutan kepada peternakan sapi potong, agar secara simultan dengan program-program lainnya dapat meningkatkan populasi.

3. Promosi konsumsi daging sapi produksi dalam negeri

Peningkatan permintaan daging sapi harus terus dilakukan melalui promosi. Ke depan strategi promosi konsumsi daging sapi akan ditujukan untuk mengubah image masyarakat terhadap produk daging sapi dalam negeri yang

lebih baik kualitasnya. Promosi dilaksanakan bersama oleh seluruh stakeholder sapi potong untuk meningkatkan permintaan. Dengan permintaan yang semakin baik tentu saja akan mendorong produksi.

4. Pengembangan sektor retail

Pengembangan sektor retail untuk usaha sapi potong merupakan sektor yang mata rantainya sangat panjang. Secara umum, lalu lintas ternak di Indonesia berasal dari bagian timur Indonesia ke bagian wilayah barat atau wilayah lainnya. Lau lintas ini sangat panjang dan kurang efisien, sehingga sektor retail akan menguasai di setiap rantai tersebut dan sektor retail yang diuntungkan adalah mata rantai sektor hilir. Hasil studi menunjukkan bahwa sektor hulu (peternak) hanya menikmati 40% dari harga pasar konsumen. Ini berarti sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pedagang, dan menjadi tidak proporsional. Dampaknya terhadap sektor retail, di segmen hulu sektor retailnya dikuasai oleh usaha kecil, sedangkan di sektor hilirnya dikuasai pengusaha besar. Kondisi ini harus dirubah, melalui pemberdayaan peternak agar usahanya mencapai skala ekonomi, dan peternak tidak lagi menjadi *price taker*, tetapi menjadi *price setter*.

BAB III KERANGKA PIKIR

Swasembada daging sapi sebagai program pemerintah merupakan kemampuan pemerintah sebagai regulator menyediakan 90% dari total kebutuhan daging sapi lokal di dalam negeri sedangkan 10% sisanya berasal dari pasokan dari luar negeri berupa impor sapi bakalan dan impor daging. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 ini merupakan tindak lanjut program swasembada daging yang pernah dicanangkan pada tahun 2005 dan tahun 2010.

Evaluasi terhadap kurangberhasilan program swasembada daging beserta permasalahan teknis dan non-teknis yang teridentifikasi pada periode sebelumnya digunakan sebagai rujukan untuk menyusun kegiatan pokok, kegiatan operasional, dan rencana aksinya. Salah satu hal penting yang dihasilkan dari evaluasi tersebut adalah tidak efektifnya Peraturan Menteri Pertanian (No:59/Permentan/HK.060/8/2007) yang diberlakukan sejak tahun 2008 dalam mengimplementasikan program swasembada daging sapi karena kurangnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan tujuh langkah operasional Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Tahun 2010. Namun demikian, kontribusi yang dihasilkan dari pelaksanaan tujuh langkah operasional tersebut sampai akhir tahun 2009 ini adalah (a) optimalisasi akseptor dan Intensifikasi Kawin Alam (InKA) dapat memberikan kontribusi daging sebesar 79,8 ribu ton, sapi betina produktif 448,551 ekor, dan kelahiran 58,3% dari 1,46 juta akseptor; (b) InKA saja memberikan kontribusi 17,3 ribu ton daging dan sapi betina produktif sebanyak 97.195 ekor; (c) Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif memberikan kontribusi penyelamatan 18.859 ekor sapi betina produktif dan kelahiran 14.521 ekor; dan (d) Kegiatan penanganan gangguan reproduksi dapat memberikan kontribusi penyediaan daging sebesar 1,3 ribu ton.

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) Tahun 2014 adalah upaya khusus pengembangan peternakan sapi lokal maupun sapi persilangan antara sapi lokal dan sapi *exotic* dengan memperhatikan aspek perbibitan, pakan, budidaya,

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta aspek penunjang seperti permodalan, kelembagaan, dan pemberdayaan peternak. Dengan memperhatikan pencapaian kinerja P2SDS 2010 dengan berbagai permasalahan dan tantangan ke depan, disertai komitmen Presiden RI dalam menyukseskan swasembada daging sapi di Indonesia, program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 dipertajam menjadi lima kegiatan pokok, yaitu (1) penyediaan bakalan/daging sapi lokal, (2) peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, (3) pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (4) penyediaan bibit sapi lokal, dan (5) pengaturan stock daging sapi dalam negeri.

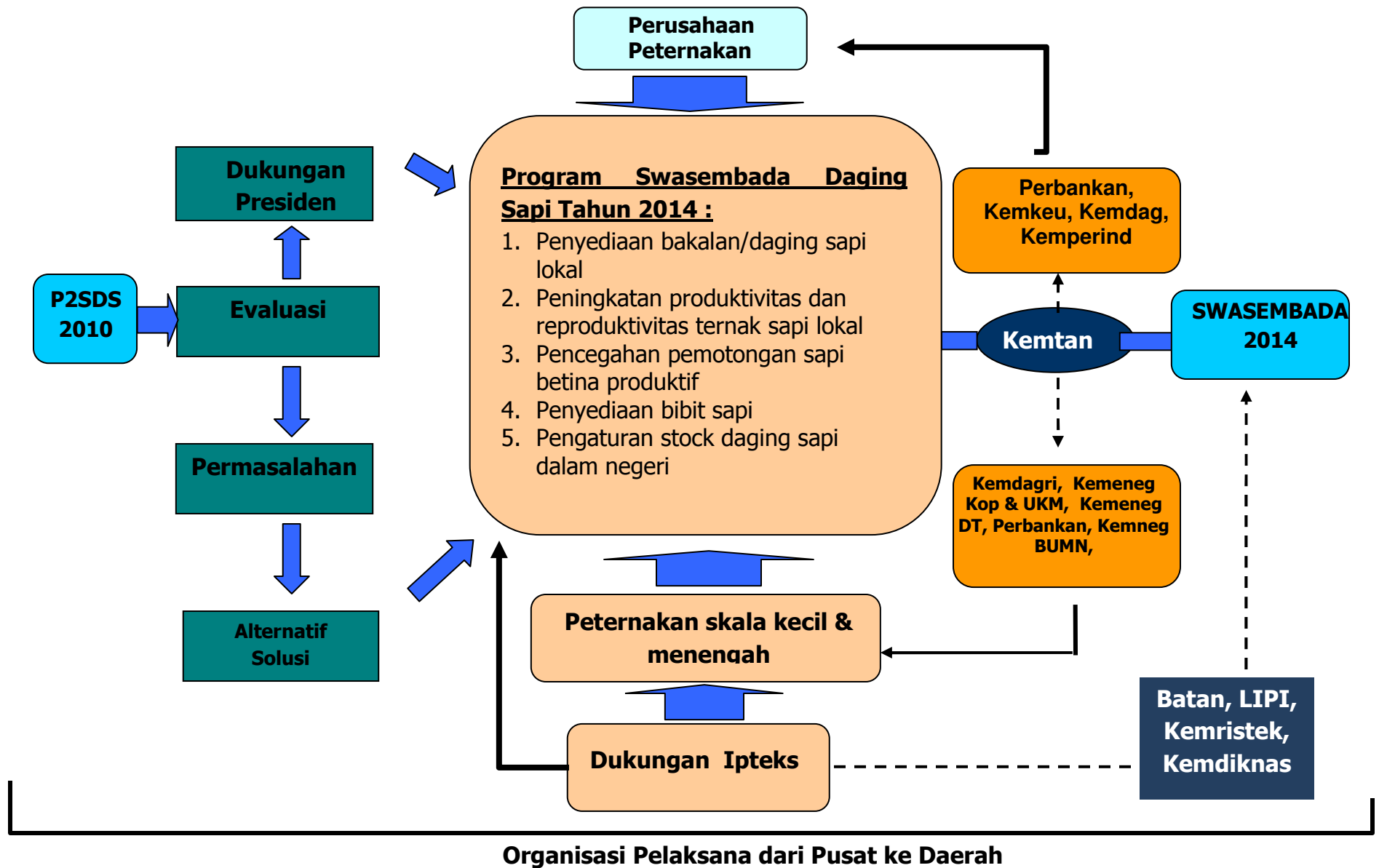
Pelaku utama yang secara riil menjalankan lima kegiatan pokok tersebut sebenarnya bukan pemerintah tetapi pelaku usaha peternakan sapi berskala kecil dan menengah; serta pelaku usaha peternakan sapi berskala besar. Sebagai program pemerintah yang memanfaatkan dana publik (yang dikelola negara), lima kegiatan pokok tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha peternakan berskala kecil (jumlah kepemilikannya sedikit tetapi dilakukan oleh banyak peternak) dengan tetap memperhatikan fungsi fasilitator dan regulator yang kondusif bagi pelaku usaha peternakan berskala besar (jumlah kepemilikannya banyak tetapi pelakunya sedikit). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengusaha besar mestinya mandiri dalam pengadaan modal dan penyediaan teknologinya sedangkan pelaku usaha berskala kecil masih memiliki kendala dari banyak aspek.

Walaupun ini merupakan program nasional yang menjadi komitmen politik Presiden RI, Kementerian Pertanian merupakan *“leading sector”* yang diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan peran kementerian lainnya seperti: (a) Kementerian Keuangan dalam penyediaan anggaran untuk menstimulus usaha peternakan atau untuk menjalankan semua program pemerintah; (b) Perbankan dalam hal pemberian pinjaman modal yang bunganya disubsidi pemerintah atau pemberian pinjaman modal melalui skema lain yang berbeda; (c) Kementerian Perindustrian dalam hal fasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan usaha peternakan sapi; (d) Kementerian Perdagangan dalam hal pengendalian distribusi dan pemasaran ternak dan produknya di dalam dan dari luar negeri; (e) Kementerian Dalam Negeri dalam hal

dukungan terhadap pemerintah daerah yang wilayahnya mengembangkan usaha peternakan; (f) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam hal pemberian bantuan kredit bagi peternak berskala kecil dan menengah; (g) Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Energi-Sumber Daya Mineral dalam hal dukungan penggunaan dana CSR perusahaan besar milik pemerintah (yang bergerak di luar bidang pertanian/peternakan) bagi pengembangan usaha peternakan.

Instansi lain yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan lima kegiatan pokok tersebut dan secara terus menerus telah berkontribusi dalam mengembangkan usaha peternakan melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah Badan Atom Nasional (BATAN) yang banyak bergerak di bidang pakan dan reproduksi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang banyak bergerak di bidang budidaya ternak sapi, reproduksi, dan genetika; Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang banyak bergerak di bidang kajian teknologi pembibitan dan pakan; Kementerian Pendidikan Nasional yang banyak melakukan penelitian dasar di bidang peternakan. Instansi tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah dan akan terus berkontribusi dalam pembangunan peternakan nasional, serta perlu diperhitungkan kontribusinya dalam ikut mensukseskan program PSDS 2014 ini.

Melalui sinergi antara pelaku usaha peternakan, instansi pemerintah lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, yang dikoordinir oleh tim pelaksana yang terorganisir secara vertikal dari pusat ke daerah, dengan selalu memperhatikan jejaring horizontalnya, PSDS 2014 diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia berswasembada daging. Keberhasilan PSDS 2014 diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara lengkap kerangka pikir program PSDS tahun 2014 disajikan pada Gambar 5



Gambar 5 : Kerangka Pikir Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014

Dari lima kegiatan pokok PSDS 2014, setiap kegiatan tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam kegiatan operasional yang secara keseluruhan terdiri atas 13 kegiatan. Kegiatan pokok “penyediaan bakalan/daging sapi lokal” diimplementasikan dalam empat kegiatan operasional yaitu (1) Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal; (2) Pengembangan pupuk organik dan biogas; (3) Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman; (4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Rumah Potong Hewan (RPH). Kegiatan pokok “peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal” diimplementasikan dalam tiga kegiatan operasional yaitu (5) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (InKA); (6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (7) Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan pokok “pencegahan pemotongan sapi betina produktif” diimplementasikan melalui satu kegiatan operasional yaitu (8) penyelamatan sapi betina produktif. Kegiatan pokok “penyediaan sapi bibit” diimplementasikan dalam tiga kegiatan operasional yaitu (9) Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan; (10) Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui *Village Breeding Centre* (VBC); (11) Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga (program Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS). Kegiatan pokok “pengaturan stock daging sapi di dalam negeri” diimplementasikan dalam dua kegiatan operasional yaitu (12) Pengaturan stock sapi bakalan dan daging sapi; dan (13) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging. Secara diagramatik, 13 kegiatan operasional yang diimplementasikan untuk menerapkan lima kegiatan pokok disajikan pada Gambar 6.

Pada dasarnya lima kegiatan pokok PSDS 2014 tersebut dilaksanakan di seluruh 33 provinsi di Indonesia namun tidak semua provinsi melaksanakan 13 kegiatan operasional. Berdasarkan kepadatan populasi sapi, 20 provinsi diprioritaskan dalam program PSDS 2014 sedangkan 13 provinsi lainnya diarahkan menjadi wilayah pertumbuhan baru yang mendukung swasembada daging sapi secara berkelanjutan.

Gambar 6. Kegiatan pokok dan kegiatan operasional yang mendukung keberhasilan program PSDS 2014



Berdasarkan jumlah populasi ternak sapi potong beserta faktor pendukung lainnya seperti daya dukung lahan untuk pakan, budidaya, kondisi geografis, dan kualitas sumber daya peternak, 20 provinsi yang diprioritaskan dalam program PSDS 2014 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. **Kelompok I** Daerah prioritas pengembangan Inseminasi Buatan (IB) mencakup lima provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
2. **Kelompok II** Daerah prioritas pengembangan IB dan Intensifikasi Kawin Alam (InKA) secara bersamaan mencakup 12 provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jambi, dan Riau.
3. **Kelompok III** Daerah prioritas pengembangan InKA mencakup tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pengamatan terhadap usaha peternakan di aspek budidaya di Indonesia menunjukkan bahwa lambatnya peningkatan populasi sapi potong secara mayoritas disebabkan oleh (a) tingginya angka kematian; (b) banyaknya pemotongan sapi betina produktif; (c) pemotongan sapi pada umur muda; dan (d) rendahnya angka kelahiran (*calf crop*). Keempat penyebab tersebut akan diperhatikan secara khusus terkait dengan 13 kegiatan operasional karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya meningkatkan populasi yang berujung pada pencapaian swasembada daging. Keterkaitan antara kegiatan operasional dan dampak yang ditimbulkan memperbaiki empat penyebab tersebut dapat diilustrasikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Matrik Keterkaitan antara Upaya Meningkatkan Populasi dan Kegiatan Prioritas dalam Mewujudkan PSDS 2014

No	Tiga Belas Kegiatan Operasional	Upaya Meningkatkan Populasi			
		Menekan Kematian	Penjaringan SBP	Tunda Potong	Peningkatan Angka Kelahiran
1	Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal	*	****	****	****
2	Pengembangan pupuk organik dan biogas	-	*	****	**
3	Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman	-	****	**	****
4	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH	-	****	**	***
5	Optimalisasi IB dan InKA	*	**	-	****
6	Penyediaan dan pengembangan pakan dan air	****	*	*	***
7	Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan	****	*	*	***
8	Penyelamatan sapi betina produktif	**	****	-	***
9	Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha	**	*	*	****
10	Pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC	*	-	-	****
11	Penyediaan bibit melalui subsidi bunga (KUPS)	-	****	-	****
12	Pengaturan stock sapi bakalan dan daging sapi	-	****	****	-
13	Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging	-	-	**	-

BAB IV

ROAD MAP SKENARIO: PESIMISTIC, MOST LIKELY, DAN OPTIMISTIC

Tidak ada yang bisa menjamin apakah swasembada daging sapi dapat dicapai pada tahun 2014 karena adanya berbagai faktor yang menyelimuti usaha peternakan sapi potong di Indonesia selama ini, seperti data populasi sapi dan produksi daging yang kurang akurat. Oleh karena itu, tiga skenario yang disusun di sini digunakan untuk mengilustrasikan tingkat keberhasilan program PSDS 2014. Ketiga skenario tersebut adalah (a) *pesimistic*, dimana Indonesia hanya akan mampu memenuhi 47.6% dari total kebutuhan sapi dan 52.4% dari total kebutuhan daging; (b) *most likely*, dimana Indonesia telah mampu mengurangi impor sapi dan daging sampai 10% saja; (c) *optimistic*, dimana Indonesia akan dapat mengekspor sapi dan daging karena ada kelebihan 10% dari total kebutuhan di dalam negeri. Perjalanan untuk mencapai tingkat keberhasilan berdasarkan tiga skenario tersebut dari tahun ke tahun diilustrasikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian persentase produksi domestik dan persentase impor berdasarkan skenario *Pesimistic*, *Most Likely*, dan *Optimistic*

Tahun	Produksi domestik (%)			Impor (%)		
	Pesimistic	Most likely	Optimistic	Pesimistic	Most likely	Optimistic
2009	63.5	63.5	63.5	46.5	46.5	46.5
2010	52.1	70.2	78.9	47.9	29.8	21.1
2011	50.8	75.5	85.9	49.2	24.5	14.1
2012	49.6	80.5	92.9	50.4	19.5	7.1
2013	48.6	85.3	100.9	51.4	14.7	- 0.9
2014	47.6	90.0	110.0	52.4	10.0	- 10.0

Tabel 7 tersebut mengilustrasikan bahwa untuk skenario *pesimistic* tanpa upaya-upaya terobosan (yaitu hanya melakukan kegiatan reguler saja), produksi domestik akan mengalami penurunan sampai dengan 47,6% sehingga akan membuat ketergantungan impor semakin meningkat. Untuk skenario *most likely* (dapat memenuhi

90% kebutuhan dalam negeri) berbagai upaya sebagaimana direncanakan dalam kegiatan pokok dan kegiatan operasional harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk skenario *optimistic* (dapat melampaui kebutuhan daging di dalam negeri), berbagai upaya tambahan kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan program PSDS 2014 harus terjamin keberlanjutannya. Ini tidak mudah tapi merupakan tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh bangsa Indonesia. Penjabaran lebih rinci mengenai capaian pemenuhan produksi domestik dan pengurangan impor dari tahun ke tahun digambarkan melalui perkembangan jumlah populasi sapi, produksi daging, dan konsumsi daging secara nasional, seperti disajikan pada Tabel 8.

Berdasarkan asumsi bahwa populasi sapi potong di Indonesia tahun 2009 adalah 12.610.100 ekor dan impor sapi bakalan sebanyak 580 ekor serta impor daging sebanyak 72.800 ton, melalui berbagai kegiatan pokok dalam program PSDS, maka pada tahun 2014 populasi sapi potong di Indonesia meningkat menjadi 14.197.700 ekor (skenario *pesimistic*), 14.231.700 ekor (*most likely*), atau 14.423.000 ekor (*optimistic*) sedangkan impor sapi bakalan menjadi 687.460 ekor (*pesimistic*), 85.400 ekor (*most likely*), atau 0 ekor (*optimistic*). Demikian juga untuk impor dagingnya menjadi 121.850 kg (*pesimistic*), 15.380 kg (*most likely*), atau 0 kg (*optimistic*).

Tabel 7 di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai populasi skenario *most likely* masih harus ada tambahan dari impor sapi bakalan yang setara dengan 15.4 ribu ton daging dan impor daging sebanyak 31,2 ribu ton. Untuk skenario *optimistic*, Indonesia mampu mengekspor daging sebanyak 46,76 ribu ton (10% dari produksi domestik).

Tabel 8 Proyeksi perkembangan populasi, produksi, dan konsumsi dari tahun 2009 s/d 2014 dengan tiga skenario berbeda (*pesimistic*, *most likely*, dan *optimistic*)

Perkembangan	Produksi Domestik			Impor		
	<i>Pesimistic</i>	<i>Most Likely</i>	<i>Optimistic</i>	<i>Pesimistic</i>	<i>Most Likely</i>	<i>Optimistic</i>
Tahun 2009						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	12,610.10	12,610.10	12,610.10	580.00 72.80	580.00 72.80	580.00 72.80
Produksi (000 ton)	250.80	250.80	250.80	70.00	70.00	70.00
Konsumsi (000 ton)	250.80	250.80	250.80	142.80	142.80	142.80
Tahun 2010						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	12,813.50	12,794.90	12,748.00	565.58 100.25	260.00 46.44	40.80 7.36
Produksi (000 ton)	209.96	282.90	317.90	92.90	73.76	77.84
Konsumsi (000 ton)	209.96	282.90	317.90	193.15	120.20	85.20
Tahun 2011						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	13,123.00	13,169.50	13,031.90	593.86 105.19	196.90 35.29	12.20 2.19
Produksi (000 ton)	212.66	316.10	358.50	100.70	67.21	57.44
Konsumsi (000 ton)	212.66	316.10	358.50	205.89	102.50	59.63
Tahun 2012						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	13,456.20	13,521.60	13,384.30	623.53 110.45	149.00 27.27	3.60 0.68
Produksi (000 ton)	215.61	349.70	403.40	108.30	57.43	30.32
Konsumsi (000 ton)	215.61	349.70	403.40	218.75	84.70	31.00
Tahun 2013						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	13,814.10	13,870.50	13,839.80	654.73 116.01	112.80 20.34	1.10 (0.28)
Produksi (000 ton)	218.81	384.20	454.20	115.70	45.96	(3.42)
Konsumsi (000 ton)	218.81	384.20	454.20	231.71	66.30	(3.70)
Tahun 2014						
Populasi (000 ekor) (....ribu ton)	14,197.70	14,231.70	14,423.00	687.46 121.85	85.40 15.38	- -
Produksi (000 ton)	222.28	420.40	513.80	122.90	31.22	(46.80)
Konsumsi (000 ton)	222.28	420.40	513.80	244.75	46.60	(46.80)

Keterangan : (....) populasi setara produksi daging

A. Strategi Pencapaian Sasaran Pada Berbagai Skenario.

Angka-angka perkembangan populasi sapi dan produksi dagingnya dari tahun 2009 s/d 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 7 didasarkan pada parameter teknis seperti tingkat kelahiran ternak, tingkat kematian ternak, *calving interval*, impor bibit, kelahiran hasil IB, kelahiran hasil InKA, berat karkas sapi hasil IB dan hasil InKA, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelamatan betina produktif, dan penanganan penyakit hewan. Angka atau nilai untuk setiap parameter tersebut berbeda, yang tergantung pada skenario yang digunakan. Secara lengkap, kinerja/performans sapi berdasarkan parameter tersebut di atas disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Performans sapi potong pada Berbagai Skenario

Parameter teknis	Kinerja sapi berdasar skenario		
	Pesimistic	Most Likely	Optimistic
Kelahiran (%)	20.0	23.6	28.5
Kematian (%)	1.4	1.4	1.4
Calving Interval (bln)	21.0	17.5	15.0
Impor bibit (e)	5,000.0	5,000.0	50,000.0
Kelahiran IB (000e)	886.4	1,599.5	1,599.5
Kelahiran INKA (000 e)	1,003.8	1,179.7	1,562.2
Berat karkas INKA (e/kg)	114.6	139.1	164.5
Berat karkas IB (e/kg)	222.2	226.0	240.9
Gangguan reproduksi (000e)	100.0	200.0	400.0
Penyelamatan Betina Produktif (000e)		150.0	250.0
Penanggulangan penyakit (000e)	1,100.0	1,200.0	1,400.0
Regulasi	Pengaturan bibit	Pengaturan bibit	Pengaturan bibit ternak
	Pengaturan tata niaga dan importasi ternak	Pengaturan tata niaga dan importasi ternak	Pengaturan tata niaga dan importasi

1. Strategi untuk skenario *Pesimistic*.

Pada skenario *pesimistic* ini, sebenarnya tidak ada upaya khusus yang bersifat terobosan tetapi hanya melaksanakan kegiatan reguler yang biayanya sepenuhnya dari APBN reguler. Oleh karena itu, peningkatan populasi dan produktivitas sapi tidak optimal.

2. Strategi untuk skenario *Most Likely*.

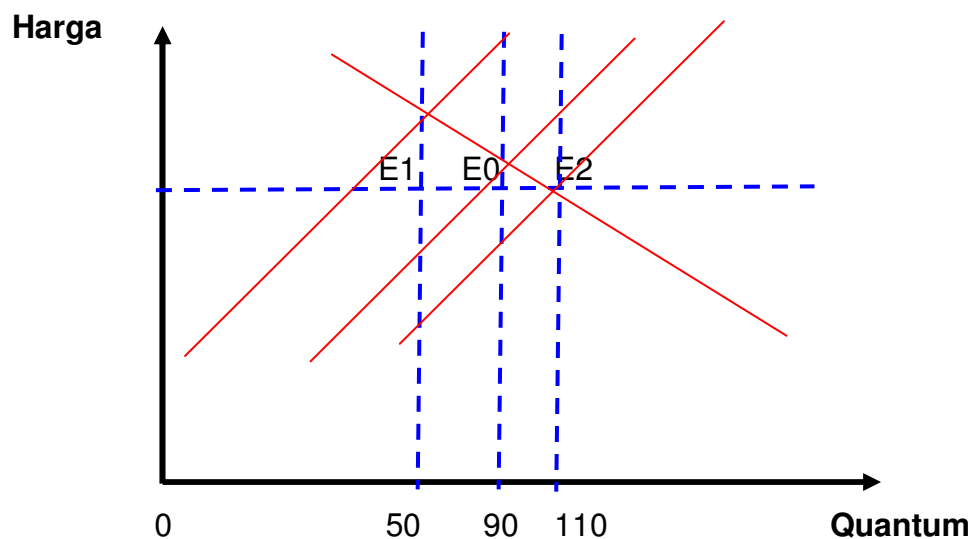
Pada skenario ini, diperlukan upaya khusus yang bersifat terobosan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, menerbitkan regulasi yang kondusif dan menerapkan sistem perkarantinaaan yang kuat. Langkah yang dilakukan untuk mencapai swasembada daging adalah semua kegiatan pokok dan kegiatan operasional sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Pikir (Bab III) yang terdiri atas lima kegiatan pokok dan 13 kegiatan operasional. Melalui 13 (tiga belas) kegiatan operasional itu diharapkan terjadi peningkatan berat badan hidup sapi siap potong sampai mencapai 800 kg, peningkatan berat lahir anak

sapi --baik melalui IB maupun kawin alam-- sehingga berat karkasnya mencapai 226 kg, dan seterusnya. Untuk ini diperlukan intervensi pemerintah dalam berbagai bentuk pemberian insentif khusus kepada para pelaku usaha peternakan sapi.

3. Strategi untuk skenario *optimistic*.

Pada skenario *optimistic* ini, pada dasarnya strategi yang digunakan adalah menjalankan semua kegiatan pokok dan kegiatan operasional seperti pada skenario *most likely* namun dengan tambahan program yang mempercepat perkembangan usaha peternakan mulai dari hulu, on farm (budidaya), maupun hilir. Tambahan program diantaranya mencakup penyediaan kredit bunga murah atau subsidi bunga atau berbagai insentif yang membuat usaha peternakan sapi menjadi semakin kondusif. Secara skematis gambaran dari ketiga skenario tersebut disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Capaian swasembada daging sapi dari berbagai skenario.



Keterangan :

E0 = Titik skenario *most likely*, karena seluruh produksi dalam negeri dipakai untuk konsumsi dan terjadi impor 10%.

E1 = Titik skenario *pesimistic*, karena suplay domestik hanya 50% dan impor 50%.

E2 = Titik skenario *optimistic*, karena suplay domestik melebihi konsumsi dan dapat diekspor kurang lebih 10%.

B. Kontribusi Kegiatan Terhadap Peningkatan Populasi dan Produksi Daging

Untuk mengilustrasikan besar kecilnya kontribusi setiap provinsi terhadap peningkatan populasi dalam rangka pencapaian program PSDS 2014 atas kinerjanya melaksanakan semua kegiatan pokok dan kegiatan operasional, skenario yang digunakan dalam memprediksinya adalah *most likely*. Berdasarkan parameter teknis seperti disajikan pada Tabel 9, maka prediksi peningkatan populasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 disajikan pada Tabel 10 sedangkan prediksi peningkatan produksi daging dari tahun 2010 sampai dengan 2014 disajikan pada Tabel 11.

Berbagai kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak dan peningkatan produksi daging adalah peningkatan jumlah akseptor IB dan akseptor kawin alam; peningkatan kualitas kegiatan Sarjana Masuk Desa (SMD), penerapan pola integrasi tanaman secara masif, pengadaan dan pengefektifan padang penggembalaan, pembibitan pola *In situ* dan *ex situ* dan penambahan jumlah bibit sapi. Selain itu, berbagai kegiatan lain seperti tunda potong, pengembangan usaha agribisnis, revitalisasi RPH, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dan lain lain juga diprediksi memberikan kontribusi yang tidak kecil. Dari semua kegiatan tersebut, diprediksi bahwa penambahan akseptor IB dan INKA akan memiliki kontribusi terbesar dibanding kegiatan lainnya.

Tabel 10 Kontribusi Provinsi Terhadap Peningkatan Populasi

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	34,123	41,048	47,982	55,149	62,762
2	Sumut	20,664	24,859	29,058	33,398	38,008
3	Sumbar	25,009	30,084	35,166	40,419	45,999
4	Riau	8,580	10,322	12,065	13,867	15,781
5	Jambi	7,933	9,543	11,155	12,821	14,591
6	Sumsel	17,900	21,533	25,170	28,929	32,923
7	Bengkulu	4,962	5,969	6,977	8,019	9,126
8	Lampung	22,649	27,246	31,848	36,605	41,659
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jabar	8,956	10,774	12,594	14,475	16,473
11	Jateng	43,697	52,566	61,445	70,623	80,373
12	DI Yogyakarta	8,179	9,840	11,502	13,220	15,045
13	Jatim	102,571	123,389	144,232	165,775	188,660
14	Bali	20,244	24,353	28,466	32,718	37,235
15	NTB	29,067	34,967	40,873	46,978	53,464
16	NTT	43,668	52,532	61,405	70,577	80,320
17	Kalbar	8,945	10,760	12,578	14,456	16,452
18	Kalteng	3,681	4,428	5,176	5,949	6,770
19	Kalsel	11,211	13,487	15,765	18,119	20,621
20	Kaltim	6,856	8,247	9,640	11,080	12,609
21	Sulut	8,249	9,924	11,600	13,333	15,173
22	Sulteng	15,526	18,678	21,833	25,093	28,558
23	Sulsel	37,434	45,032	52,638	60,500	68,853
24	Sultra	18,075	21,743	25,416	29,212	33,245
25	Maluku	5,685	6,839	7,994	9,188	10,456
26	Papua	4,269	5,136	6,003	6,900	7,852
27	Babel	714	859	1,004	1,154	1,313
28	Banten	3,230	3,885	4,542	5,220	5,941
29	Gorontalo	12,119	14,579	17,041	19,587	22,291
30	Malut	3,921	4,716	5,513	6,336	7,211
31	Kepri	601	723	845	971	1,106
32	Papua Barat	2,688	3,233	3,780	4,344	4,944
33	Sulbar	7,476	8,994	10,513	12,083	13,752
	Jumlah	548,880	660,285	771,817	887,098	1,009,565

Tabel 11 Kontribusi Provinsi Terhadap Peningkatan Produksi Daging

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	4,539	6,432	8,334	10,284	12,315
2	Sumut	2,749	3,895	5,047	6,228	7,458
3	Sumbar	3,327	4,714	6,108	7,537	9,026
4	Riau	1,141	1,617	2,096	2,586	3,097
5	Jambi	1,055	1,495	1,938	2,391	2,863
6	Sumsel	2,381	3,374	4,372	5,395	6,460
7	Bengkulu	660	935	1,212	1,495	1,791
8	Lampung	3,013	4,269	5,532	6,826	8,174
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jabar	1,191	1,688	2,188	2,699	3,232
11	Jateng	5,813	8,237	10,673	13,170	15,771
12	DI Yogyakarta	1,088	1,542	1,998	2,465	2,952
13	Jatim	13,645	19,334	25,053	30,914	37,019
14	Bali	2,693	3,816	4,945	6,101	7,306
15	NTB	3,867	5,479	7,100	8,761	10,491
16	NTT	5,809	8,231	10,666	13,161	15,760
17	Kalbar	1,190	1,686	2,185	2,696	3,228
18	Kalteng	490	694	899	1,109	1,328
19	Kalsel	1,491	2,113	2,738	3,379	4,046
20	Kaltim	912	1,292	1,674	2,066	2,474
21	Sulut	1,097	1,555	2,015	2,486	2,977
22	Sulteng	2,066	2,927	3,792	4,679	5,604
23	Sulsel	4,980	7,056	9,143	11,282	13,510
24	Sultra	2,405	3,407	4,415	5,447	6,523
25	Maluku	756	1,072	1,389	1,713	2,052
26	Papua	568	805	1,043	1,287	1,541
27	Babel	95	135	174	215	258
28	Banten	430	609	789	973	1,166
29	Gorontalo	1,612	2,284	2,960	3,652	4,374
30	Malut	522	739	958	1,182	1,415
31	Kepri	80	113	147	181	217
32	Papua Barat	358	507	657	810	970
33	Sulbar	995	1,409	1,826	2,253	2,698
	Jumlah	73,019	103,463	134,064	165,425	198,096

BAB V

KEGIATAN POKOK DAN OPERASIONAL

A. Penyediaan Bakalan/Daging Sapi Lokal

1. Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan produksi daging, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Pengembangan usaha penggemukan atau tunda potong sapi lokal dan sapi persilangan (IB) melalui penguatan modal usaha kelompok peternak, dengan cara memberikan fasilitas kredit murah maupun pemberian modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Peningkatan usaha agribisnis sapi potong untuk usaha penggemukan sekaligus mempercepat peningkatan populasi ternak melalui Sarjana Membangun Desa (SMD), dengan cara pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dimotori oleh peternak berpendidikan minimal sarjana/D3 Peternakan/Keswan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

2. Pengembangan pupuk organik dan biogas

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha penggemukan sapi lokal dan atau sapi persilangan (IB) melalui pola *Kereman*, kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan pupuk organik dan biogas melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Pengembangan pupuk organik dan jaringan pemasaran, dengan cara:
 - 1) Pemberian bantuan dana untuk membangun rumah kompos (bangunan penyimpan kotoran ternak untuk diproses lebih lanjut) beserta semua perangnya di kelompok peternak yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu.
 - 2) Pemberian pelatihan manajemen dan organisasi bagi kelompok peternak pengelola rumah kompos, beserta pelatihan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya lokal.
 - 3) Fasilitasi promosi dan pengembangan jaringan pemasaran kompos dan tata-niaga ternak.
- b. Pembangunan instalasi biogas untuk penyediaan energi alternatif di pedesaan, dengan cara:
 - 1) Pemberian bantuan dana untuk membangun instalasi biogas beserta seluruh perangkat penunjangnya di kelompok peternak yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu dan secara fisik lokasi kandangnya berkelompok.
 - 2) Pemberian pelatihan dalam pemanfaatan biogas secara optimal bagi anggota kelompok peternak.

3. Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman

Kegiatan pengembangan integrasi tanaman-ternak ditargetkan untuk memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha budidaya tanaman, sekaligus dengan meningkatkan jumlah populasi ternak sapi melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Integrasi tanaman-ternak untuk usaha budidaya sapi di lahan perkebunan, lahan tanaman pangan, lahan hortikultura, dan lahan kehutanan, dengan cara:
 - 1) Koordinasi dengan perusahaan yang berperan sebagai inti, antara lain PTP/Perusda/swasta perkebunan/kehutanan atau pertambangan

- 2) Pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang memelihara ternaknya di lahan perkebunan, di sekitar lahan tanaman pangan, hortikultura atau di lahan kehutanan, untuk digunakan dalam pengadaan sapi bibit dan fasilitas pendukungnya.
 - 3) Pengadaan sarana prasarana untuk mewujudkan usaha peternakan pola integrasi dan untuk mencukupi kebutuhan pakan dari limbah pengolahan sawit (BIS) atau limbah agroindustri lainnya (tetes, onggok, dlsb).
- b. Integrasi ternak-tanaman melalui program CSR dari perusahaan perkebunan atau agribisnis lainnya, dengan cara:
- 1) Perusahaan agribisnis (di luar bidang peternakan) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi kepada kelompok peternak yang berusaha di lahan perusahaan tersebut untuk menambah populasi sapi.
 - 2) Perusahaan pertambangan atau lainnya (bukan usaha agribisnis peternakan) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi bagi kelompok peternak di sekitar atau di luar usaha non-agribisnis tersebut untuk mengembangkan usaha peternakan. Usaha yang merupakan implementasi program CSR perusahaan tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola inti-plasma.

4. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH

Peningkatan kualitas RPH ditargetkan untuk penerapan hygiene dan sanitasi di RPH dalam upaya penyediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Dengan kegiatan ini diharapkan akan terwujud 25 RPH di 20 provinsi yang memenuhi standar internasional. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Adapun pelaksanaan kegiatan operasional meliputi :

- a. Pembangunan RPH baru di provinsi yang memiliki potensi dalam usaha pemotongan hewan namun belum memiliki fasilitas RPH yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dengan cara:
 - 1) Pembangunan RPH baru yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan, baik dari aspek lokasi, prasarana jalan dan air bersih, bangunan, dan peralatan.
 - 2) Penyiapan Sumberdaya Manusia RPH yang terampil dan terlatih.
 - 3) Peningkatan kemampuan pengelola RPH dalam menerapkan manajemen RPH sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk menghasilkan produk yang ASUH.
- b. Renovasi RPH yang sudah ada dengan cara:
 - 1) Fasilitasi perbaikan bangunan dan/atau peralatan RPH sehingga mampu menerapkan praktek hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan.
 - 2) Pembinaan pelayanan teknis kesmavet di RPH.
 - 3) Penatalaksanaan manajemen dan operasional RPH yang mengacu kepada prinsip sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan.

B. Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Ternak Sapi Lokal

5. Optimalisasi IB dan InKA

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jumlah kelahiran melalui teknik IB dan InKA, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

- a. Penambahan jumlah akseptor IB, dengan cara:
 - 1) Redistribusi sapi betina produktif hasil penjarangan maupun pemanfaatan sapi *ex-impor* yang layak dibiakkan.
 - 2) Pendataan peternak yang ternaknya dapat dijadikan akseptor dalam perkawinan melalui teknik IB.
 - 3) Penambahan jumlah straw semen beku 80% melebihi jumlah akseptor, melalui program pemerintah maupun KSO (swadaya).

- 4) Pengembangan sarana prasarana pendistribusian straw semen beku, termasuk fasilitas untuk inseminator.
 - 5) Pembangunan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di sekitar lokasi beberapa kelompok peternak yang memiliki jumlah minimal tertentu dan peternaknya siap untuk mengikuti program IB.
 - 6) Pembangunan Unit Wilayah Inseminasi Buatan (UWIB) sebagai unit yang mengkoordinir ULIB di wilayah masing-masing.
 - 7) Pelatihan bagi inseminator, pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan asisten teknis reproduksi (ATR).
 - 8) Penambahan dan replacement bibit jantan sebagai donor semen di Balai/Balai-Besar IB.
 - 9) Penambahan jumlah tenaga inseminator mandiri melalui pelatihan bagi pemuda desa dan pemberian bantuan peralatan IB.
 - 10) Pemberdayaan dan pembuatan Pos IB dan keswan.
- b. Penambahan jumlah akseptor InKA dan pejantan pemacek dengan cara:
- 1) Pengadaan dan distribusi pejantan pemacek di kelompok peternak yang belum memanfaatkan teknik IB dan belum memiliki pejantan berkualitas.
 - 2) Pendataan kelompok peternak yang sapi betina produktifnya tidak dikawinkan melalui teknik IB.
 - 3) Penguatan manajemen dan organisasi kelompok peternak dalam mengelola sapi.

6. Penyediaan dan pengembangan pakan dan air

Kegiatan ini ditargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum dan pakan pada saat musim kering, seiring dengan peningkatan jumlah ternak sapi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

- a. Penambahan penyediaan pakan dan air, dengan cara :
- 1) Penanaman dan pengembangan sumber benih/bibit tanaman pakan ternak (TPT).

- a)
 - a) Inventarisasi lokasi sumber dan jenis benih/bibit tanaman pakan ternak (rumput atau *legume*) di Indonesia.
 - b) Penanaman benih/bibit tanaman pakan ternak di BPTU, UPTD daerah dan kawasan pengembangan ternak.
 - c) Pengembangan *feed bank* (lambung pakan).
 - 2) Pembuatan embung, pompa air, dan konservasi lahan untuk menjamin ketersediaan air minum saat musim kemarau.
 - 3) Pengembangan desa mandiri pakan melalui gerakan massal penanaman tanaman pakan dan pemanfaatan limbah pertanian di lokasi kelompok peternak sapi potong (antara lain kelompok PMUK, BPLM, SMD, LM3) dan di lokasi lain seperti daerah aliran sungai, sekitar embung, lahan kritis, tambang batubara, dan bekas lahan hutan produksi, atau terintegrasi dengan lahan perkebunan dalam suatu pola tumpangsari.
 - 4) Perluasan dan revitalisasi padang penggembalaan di wilayah yang berpotensi untuk pengembangan ternak pola *grazing*.
 - 5) Peningkatan pemanfaatan limbah agroindustri seperti limbah atau hasil samping perkebunan atau pabrik pengolahan sawit (bungkil inti sawit), pabrik gula (tetes), dan pabrik penggilingan padi (dedak).
- b. Pengembangan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal, dengan cara:
- 1) Pengembangan teknologi pakan, melalui aplikasi teknologi pakan (pengolahan, pengawetan, penyimpanan) dan pengadaan peralatannya di kelompok peternak.
 - 2) Penguatan kelembagaan yang menangani pengujian dan standarisasi mutu pakan.
 - 3) Pengembangan mini feedmill di kelompok peternak yang memiliki populasi ternak dengan jumlah minimal tertentu.

- 4) Peningkatan kualitas SDM bidang pakan, termasuk staf yang memiliki jabatan fungsional pengawasan mutu pakan (wastukan), serta penyediaan tenaga baru untuk wastukan di daerah/wilayah.
- 5) Restrukturisasi sistem tata niaga bahan baku pakan lokal.

7. Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan

Kegiatan ini ditargetkan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi sapi betina produktif yang telah dikawini/diinseminasi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

- a. Penanggulangan gangguan reproduksi, dengan cara:
 - 1) Pemeriksaan akseptor terhadap status penyakit *Brucellosis* (khusus di daerah yang belum bebas *Brucellosis*);
 - 2) Peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi;
 - 3) Pengadaan obat-obatan dan hormonal;
 - 4) Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi;
 - 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan cara:
 - 1) Pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.
 - 2) Pemeriksaan, identifikasi, dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet.
 - 3) Pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan

C. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif

8. Penyelamatan Sapi Betina Produktif

Kegiatan ini ditargetkan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif sebanyak 150-200 ribu ekor per tahun dengan melakukan penjarangan dan penyelamatan pedet yang dilahirkan di kelompok peternak, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan reproduksi sapi betina produktif di RPH dan di pasar hewan, terutama yang masih berumur muda atau berpotensi melahirkan anak beberapa kali lagi.
- b. Fasilitasi dana talangan untuk menyelamatkan sapi betina produktif di tingkat RPH dan mendistribusikannya ke kelompok peternak terpilih.
- c. Pembinaan kelompok peternak yang sudah mengembangkan sapi betina produktif hasil penjarangan dan kelompok peternak pembibit lainnya.
- d. Penambahan tenaga paramedis dan peningkatan kemampuan teknis petugas reproduksi.

D. Penyediaan Bibit Sapi Lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan benih dan bibit sapi yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi potong lokal sehingga produksi daging di dalam negeri dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan sebagian besar daging sapi, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut:

9. Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan, dengan cara:

- a. Pengidentifikasian wilayah yang berpotensi sebagai sumber bibit sapi.
- b. Penetapan wilayah sumber bibit sapi yang memiliki potensi menghasilkan bibit.
- c. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan dan sinergisme antar UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka seleksi, penjarangan, dan penyediaan bibit sapi unggul.

10. Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui VBC, dengan cara:

- a. Penyusunan kriteria *Village Breeding Centre* (VBC) berdasarkan acuan ilmiah.
- b. Penambahan jumlah sapi bibit di kelompok peternak yang sudah berpengalaman sesuai dengan kemampuannya dan mempunyai daya dukung pakan yang memadai.

- c. Pelatihan dan pendampingan kelompok peternak dalam rangka menerapkan program VBC berdasarkan prinsip *Good Breeding Practice*.
- d. Penetapan standard mutu bibit melalui sertifikasi bibit untuk menjaga/meningkatkan harga bibit di tingkat UPT maupun di tingkat peternak.

11. Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga (KUPS), dengan cara:

- a. Sosialisasi KUPS di pusat dan daerah oleh Kemtan, Bank, Dinas/Pemda, Asosiasi/Kelompok Peternak.
- b. Pemetaan daerah yang berpotensi menyerap program KUPS.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS antara Kemtan, Kemkeu, Perbankan dan *stakeholders* terkait.
- d. Monitoring ketersediaan ternak di dalam dan luar negeri dengan kualitas yang memadai dan harga yang kompetitif.
- e. Identifikasi dan klarifikasi pelaksana dan pemanfaatan KUPS.
- f. Penguatan modal usaha kelompok peternak sapi potong.
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KUPS secara berjenjang.
- h. Koordinasi dengan Pemda untuk pengalokasian dana (APBD/DAK/DAU) untuk dana penjaminan KUPS pada bank daerah.
- i. Pengintegrasian program KUPS dalam program SMD.

E. Pengaturan Stock Daging Sapi Dalam Negeri.

12. Pengaturan stock sapi bakalan dan daging.

- a. Pengaturan stock sapi bakalan.
Kegiatan ini ditargetkan untuk memberdayakan usaha peternakan sapi potong berbasis sumber daya lokal, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:
 - 1) Penerapan regulasi impor sapi bakalan secara benar dan konsisten.
 - 2) Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pemasukan dan pengeluaran sapi potong dan bibitnya; serta penyusunan pedoman (SOP) untuk impor sapi bakalan.

- 3) Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor sapi potong bakalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
 - 4) Pembinaan kepada perusahaan *feedlot* agar mengonversi usahanya menjadi perusahaan penggemukan berbasis sapi lokal atau menjadi perusahaan pembibitan secara bertahap.
 - 5) Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan impor bibit dan sapi bakalan.
- b. Pengaturan stock daging.

Kegiatan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk daging lokal, melalui kegiatan operasional :

- 1) Penyempurnaan dan penegakan Peraturan Menteri Pertanian tentang pemasukan daging yang terjamin ASUH.
- 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor daging sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pembinaan kepada importir dan distributor daging agar mendukung pengembangan perdagangan daging sapi lokal.
- 4) Pengembangan klasifikasi potongan daging sapi lokal.

13. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging

- a. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi.

Kegiatan ini ditargetkan untuk menjamin ketersediaan sapi di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga sapi, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:

- 1) Penetapan pengeluaran dan pemasukan sapi untuk keperluan bibit maupun pengembangan sapi antar wilayah oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat .
- 2) Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pendistribusian dan pemasaran sapi.

- 3) Pengawasan dan pemantauan kegiatan perdagangan sapi potong antar wilayah; serta pendistribusian dan pemasarannya.
 - 4) Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan perdagangan sapi bibit dan sapi bakalan antar wilayah.
 - 5) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi di dalam negeri.
- b. Pengaturan distribusi dan pemasaran daging di dalam negeri.
- Kegiatan operasional ini bertujuan menjamin ketersediaan daging di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga daging, melalui kegiatan operasional :
- 1) Peningkatan pengawasan dan pemantauan distribusi daging impor
 - 2) Pengendalian distribusi daging impor berdasarkan kelengkapan fasilitas rantai dingin dari importir sampai ke ritel.